

**PERANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK DALAM MENINGKATKAN MUTU  
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN KANDIS**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi  
Persyaratan Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan  
Pascasarjana Universitas Islam Riau**



**Oleh :**

**NAMA : ROOSMAINI  
NOMOR MAHASISWA : 167321028  
BIDANG KAJIAN UTAMA : ILMU PEMERINTAHAN**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBARAN PENGESAHAN

Nama : Roosmaini  
NPM : 167321028  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu  
Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis.

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,  
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Selasa  
Tanggal : 16 Desember 2019  
Pukul : 10.00 - 11.00 Wib

Dan dinyatakan LULUS

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Nurman, S.Sos., M.Si.

  
Dr. H. Ahmad Namlis, M.M.  
Anggota

  
Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.  
Anggota

  
Dr. Zainal, S.Sos, M.Si.

Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau,

  
Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

**PERANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
SIAK DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH  
DASAR DI KECAMATAN KANDIS**

**TESIS**

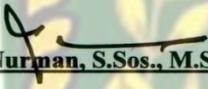
Oleh :

**Roosmaini**  
16 7321 028

**Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing**

Pembimbing I

Tanggal, 20-12-2019

  
**Dr. Nurman, S.Sos., M.Si.**

Pembimbing II

Tanggal, 18-12-2019

  
**Dr. H. Ahmad Namlis, M.M.**

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Riau

  
**Dr. H. Rahyunir Rauf., M.Si.**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
NOMOR : 065/UIR/KPTS/PS-IP/2017  
**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor: 85/M/1999
    - b. Nomor : 102/M/2001
    - c. Nomor : 228/M/2001
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
    - a. Nomor: 232/UJ/2000
    - b. Nomor: 234/UJ/2000
    - c. Nomor : 176/O/2001
  5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
    - a. Nomor: 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
    - b. Nomor: 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010
    - c. Nomor: 156/D/T/2007
    - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
    - e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
    - f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
    - g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
  6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
    - a. Nomor: 007/Kep.D/YLPI-I/1993
    - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
  8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Menunjuk :
    - a. Nama : **Dr. Nurman, S.Sos., M.Si.** sebagai **Pembimbing I**
    - b. Nama : **Dr. H. Ahmad Namlis, M.M.** sebagai **Pembimbing II**

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **ROOSMAINI**

N P M : **167321028**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Judul Tesis : **"PERANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN KANDIS".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
**KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 27 September 2017

Direktur,

**Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.**  
NPK. 92 11 02 199

Tamhuan : Dicamnaikan Kenada :

## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Peserta Ujian Tesis Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Roosmaini  
NPM : 167321028  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Tesis ini beserta seluru dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sensi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta saksi lainnya sesuai dengan ketentuan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Desember 2019

METERAI  
TEMPEL

30C27ACF4184337

6000

ROOSMAINI

xiv



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**  
Nomor: 300/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Roosmaini  
NPM : 167321028  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 7 Desember 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister  
Ilmu Pemerintahan

**Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si**

Pekanbaru, 7 Desember 2019

Staf Perpustakaan



**Sumardianto, S.IP**

Lampiran:  
- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

PERANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK DALAM  
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN KANDIS  
by Roosmaini Roosmaini



From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis)

- Processed on 07-Dec-2019 11:34 +08
- ID: 1229096661
- Word Count: 22069

Similarity Index  
25%

Similarity by Source

Internet Sources:

21%

Publications:

4%

Student Papers:

17%

**sources:**

- 1 3% match (Internet from 16-Nov-2019)  
<http://erickpratama108.blogspot.com/2013/07/1.html>
- 2 2% match (Internet from 16-Dec-2018)  
<https://mafiadoc.com/peranan-manajemen-sumber-daya-manusia-dalam-5a2eddbb1723dd74b6322797.html>
- 3 2% match (Internet from 02-Aug-2018)  
[http://gemaputri.blogspot.com/2010\\_02\\_01\\_archive.html](http://gemaputri.blogspot.com/2010_02_01_archive.html)
- 4 2% match (Internet from 29-Apr-2019)  
[http://nanaerdiyana.blogspot.com/2013/05/makalah-organisasi-dan-manajemen-publik\\_7086.html](http://nanaerdiyana.blogspot.com/2013/05/makalah-organisasi-dan-manajemen-publik_7086.html)
- 5 2% match (Internet from 10-Feb-2019)  
<https://timasstaff.weebly.com/blog/pengertian-manajemen-pendidikan-dan-pelatihan>
- 6 1% match (student papers from 31-Mar-2019)  
[Submitted to Universitas Negeri Semarang on 2019-03-31](#)
- 7 1% match (Internet from 15-May-2014)  
<http://www.slideshare.net/perencanakota/peraturan-pemerintah-no-7-tahun-2008-tentang-dekonsentrasi-dan-tugas-pembantuan>
- 8 1% match (Internet from 10-Mar-2019)  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29401/Chapter%20I.pdf;sequence=4>
- 9 1% match (Internet from 18-Dec-2017)  
<http://ppkqpbsi2011.blogspot.com/2013/01/peranan-msdm-dalam-meningkatkan-mutu.html>

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk proposal tesis dapat penulis selesaikan. “Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kandis Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Megister.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab proposal tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari proposal tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian proposal tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf., M.Si. selaku ketua beserta ketua Program studi dan jajaran Dosen pada jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam menyusun tesis ini.
4. Bapak Dr. Nurman, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Namlis, M.M selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
8. Orang beserta seluruh keluarga yang merupakan sebagai sumber kekuatan semangat dan memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2016 terutama jurusan Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan, serta rekan-rekan yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya yang tidak dapat saya cantumkan disini.

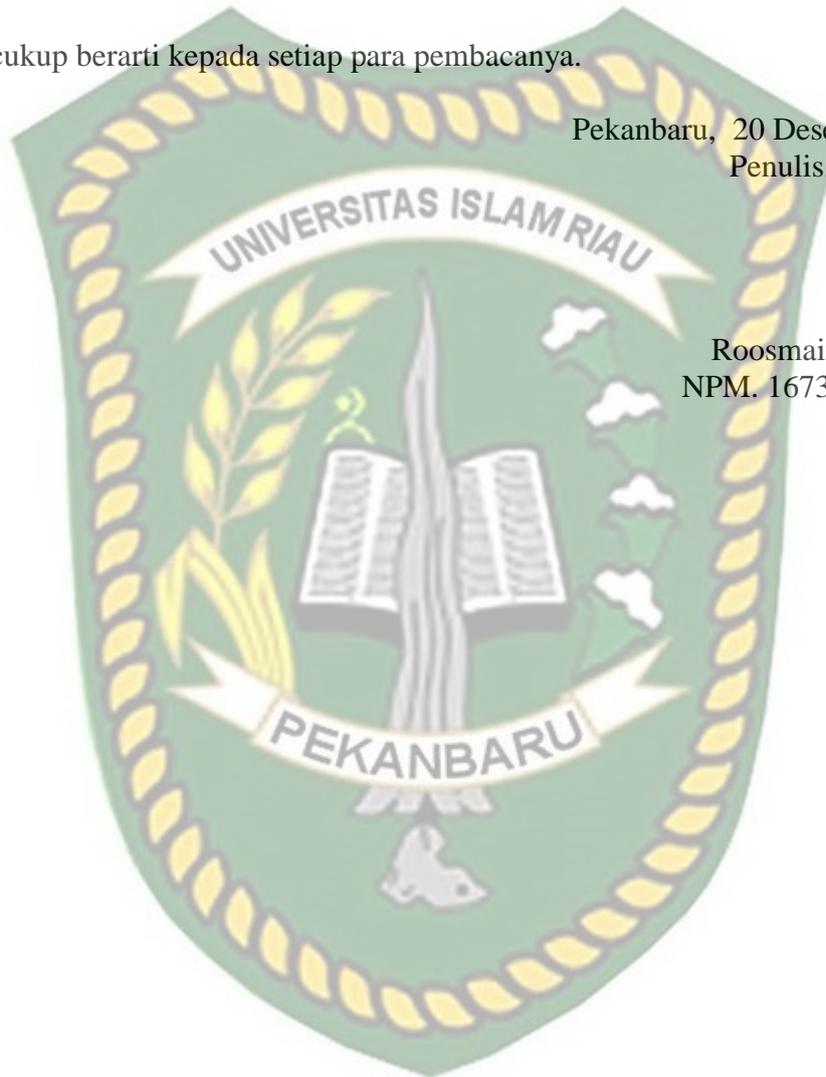
Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 20 Desember 2019

Penulis,

Roosmaini  
NPM. 167321028



## DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN TESIS .....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Perumusan Masalah .....	12
D. Batasan Masalah.....	12
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
1. Tujuan Penelitian .....	14
2. Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	14
1. Konsep Ilmu Pemerintahan .....	14
2. Konsep Organisasi Pemerintahan.....	17
3. Konsep Manajemen Pemerintahan .....	22
4. Tugas dan Fungsi Pemerintah .....	26
5. Konsep Kinerja Pemerintahan .....	29
6. Konsep Kewenangan .....	30

7. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.....	32
8. Konsep Pembinaan.....	40
9. Konsep Pelatihan.....	41
10. Peranan.....	44
11. Mutu Pendidikan.....	46
B. Kerangka Pikir.....	50
C. Konsep Operasional.....	50
D. Operasional Variabel.....	51
E. Teknik Pengukuran.....	52

**BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	56
D. Teknik Penarikan Sampel.....	57
E. Jenis dan Sumber Data.....	57
F. Teknik Pengumpulan Data.....	58
G. Teknik Analisis Data.....	58
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	60

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Responde.....	67
B. Hasil Penelitian.....	69
C. Analisis Data.....	72
1. Mengembangkan.....	72
2. Memantau.....	78
3. Mengendalikan.....	85
4. Menilai.....	91
D. Hambatan Dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis .....	100

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan ..... 102  
B. Saran ..... 103

**DAFTAR KEPUSTAKAAN ..... 104**

**DAFTAR LAMPIRAN ..... 108**



## DAFTAR TABEL

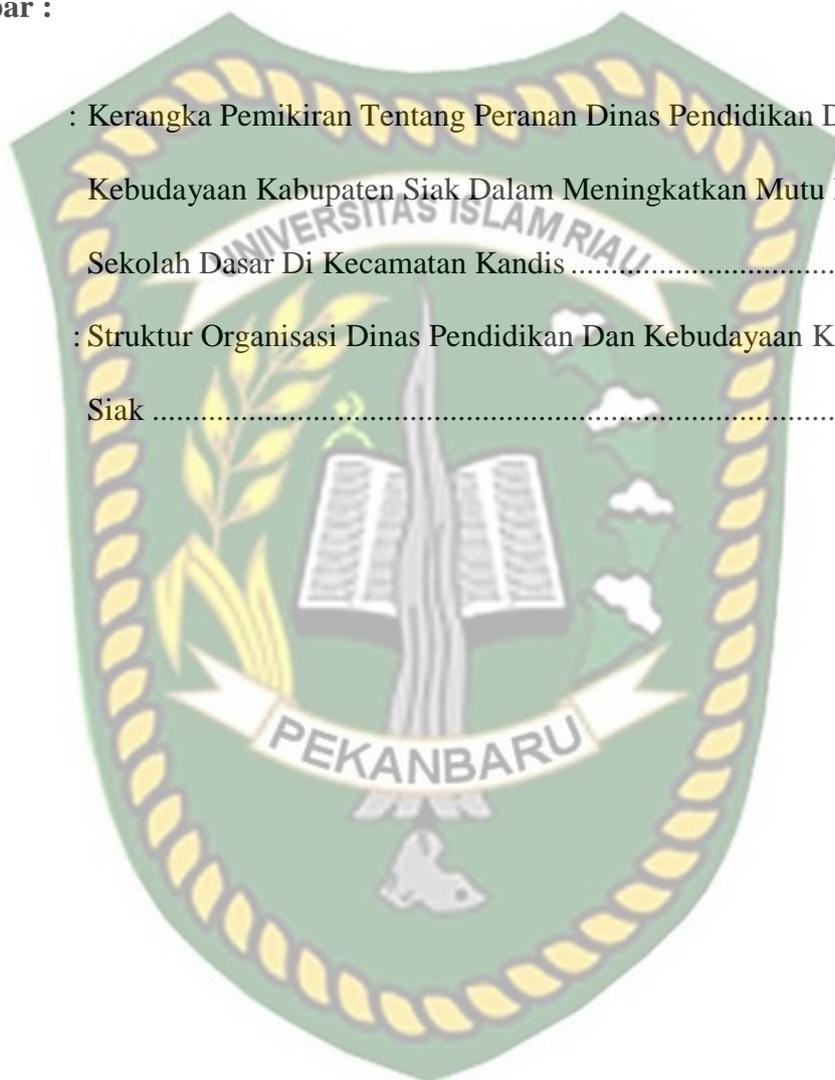
<b>Tabel :</b>		<b>Halaman</b>
I.1	Bentuk Pembinaan Dan Pelatihan Guru Pengajar Sekolah Dasar di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak 2018.....	6
I.2	Jumlah Sekolah Dasar di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak 2018.....	7
I.3	Jumlah Sekolah Dasar, Murid, Ruangan Belajar Serta Jumlah Tenaga Pendidikan di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak 2019.....	9
II.1	Jumlah Sekolah Dasar, Murid, Ruangan Belajar Serta Jumlah Tenaga Pendidikan di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak 2019.....	52
III.1	Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Dinas Pendidikan Kabupaten Siak	56
III.2	Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	60
IV.1	Jumlah Penduduk dan populasi 2018.....	62
IV.2	Pendidik Di Kabupaten Siak 2018.....	66
IV.3	Klasifikasi Responden Penelitian Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Berdasarkan Jenis Kelamin .....	68
IV.4	Klasifikasi Responden Penelitian Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Berdasarkan Umur.....	68
IV.5	Klasifikasi Responden Penelitian Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	69
IV.6	Jawaban Responden Mengenai Indikator Pengembangan Dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis .....	73
IV.7	Jawaban Responden Mengenai Indikator Mamantau Dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis. ....	79

IV.8	Jawaban Responden Mengenai Indikator Mengendalikan Dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis. ....	86
IV.9	Jawaban Responden Mengenai Indikator Menilai Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis.. ....	92
IV.10	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis. ....	98



## DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II. 1 : Kerangka Pemikiran Tentang Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis .....	50
IV. 1 : Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak .....	63



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1 : Daftar Kusioner Penelitian Tentang Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis .....	108
2 : Daftar Wawancara Penelitian Tentang Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis .....	112
3 : Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden Tentang Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis .....	115
4 : Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis .....	117

**PERANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
SIAK DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH  
DASAR DI KECAMATAN KANDIS**

**ABSTRAK**

**Roos maini  
NPM : 167321028**

Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kandis dengan mengoptimalkan tugas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak melalui Mengembangkan, Memantau, Mengendalikan, Menilai. Karena dalam pelaksanaan tugas yang baik akan terwujud hasil kinerja yang baik termasuk dalam meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kandis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis menilai serta mengetahui hambatan-hambatan di dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kandis. Metode yang digunakan metode Kuantitatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : sumbangan pikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu sosial dan politik serta acuan untuk meningkatkan peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak didalam meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar. Hasil penelitian dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kandis melalui empat indikator berada pada katagori “Cukup Terlaksana”. Bahwa Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kandis melalui Mengembangkan, Memantau, Mengendalikan, Menilai namun hal ini belum terlaksana secara merata terhadap semua sekolah Dasar di Kecamatan Kandis. Kesimpulan penelitian bahwa Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kandis belum maksimal didalam membenahan mutu pendidikan bagi Sekolah Dasar di Kecamatan Kandis. Namun penulis menyarankan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak agar lebih meningkatkan pelaksanaan kegiatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar serta melakukan kerjasama antara pegawai dengan Guru pengajar Sekolah Dasar serta Masyarakat.

*Kata Kunci : Peranan, Tugas, Mutu Pendidikan.*

**THE ROLE OF THE OFFICE OF EDUCATION AND CULTURE IN SIAK  
REGENCY IN IMPROVING THE QUALITY OF ELEMENTARY SCHOOL  
EDUCATION IN THE DISTRICT OF KANDIS**

**ABSTRACT**

**ROOSMAINI  
NPM : 167321028**

*The Role of the Office of Education and Culture in Siak Regency in Improving the Quality of Elementary School Education in the District of Kandis by optimizing the duties of the Office of Education and Culture of Siak Regency through Developing, Monitoring, Controlling, Assessing. Because in the implementation of good tasks will be realized good performance results including in improving the quality of elementary school education in the District of Kandis. The purpose of this study was to analyze assess and find out the obstacles in the Role of the Office of Education and Culture of Siak Regency in Improving the Quality of Elementary School Education in Kandis District. The method used is quantitative method. The results of this study are expected to provide the following benefits: contribution of thoughts in the context of developing science, especially in the field of social and political sciences and references to enhance the role of the Office of Education and Culture in Siak Regency in improving the quality of elementary school education. The results of research in Improving the Quality of Elementary School Education in the District of Kandis through four indicators are in the category "Implemented". That the Role of the Office of Education and Culture in Siak Regency in Improving the Quality of Elementary School Education in the District of Kandis through Developing, Monitoring, Controlling, Assessing however this has not been carried out evenly to all Elementary Schools in the District of Kandis. However, the authors suggest to the Office of Education and Culture of Siak Regency to further improve the implementation of the Quality of Elementary School Education activities and conduct cooperation between employees and Elementary School Teachers and the Community.*

*Keywords: Role, Task, Quality of Education.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber utama kehidupan konstitusional harus dapat menjadi pendorong perkembangan perikehidupan berkonstitusional sebagai tatanan hidup yang terinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka untuk membangun kehidupan tersebut maka UUD RI 1945 pasal 28 C Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi Meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sehingga tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara mendapat jamin berdasarkan undang-undang dasar.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga system ketertiban masyarakat, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban ditingkat kehidupan masyarakat.

Dalam penyelenggara pemerintahan di Negara Republik Indonesia untuk mempermudahnya maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Sebagai mana yang terdapat dalam undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi

itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Dalam rangka pelaksanaan aza desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 disebut bahwa Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:<sup>1</sup>

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Desentralisasi merupakan kecenderungan yang sangat dominan diantara berbagai fenomena global. Adapun tuntutan dan kebutuhan desentralisasi pendidikan muncul dan berkembang sebagai bagian dari agenda besar tentang demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai sala satu isu strategi dengan desentralisasi pendidikan diusahakan pemerintah mampu memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di bidang pendidikan lebih baik.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12

Desentralisasi pendidikan diterapkan untuk Meningkatkan mutu pendidikan, hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dampak positif atas kebijakan desentralisasi pendidikan meliputi :

- a. Peningkatan Mutu.
- b. Efisiensi Keuangan.
- c. Efisiensi Administrasi
- d. Pemerataan

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktifitasnya, untuk itulah maka pemerintah membentuk system administrasi dan birokrasi dari pemerintahan tingkat tinggi ke pemerintahan tingkat rendah agar dapat memberikan pelayanan yang optimal.

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan. Menurut Sumarto fungsi pokok pemerintahan dibagi dalam tiga fungsi pokok yaitu :<sup>2</sup>

- a. Pelayanan (*service*)
- b. Pemberdayaan (*empowerment*)
- c. Pembangunan (*development*)

Ketiga fungsi pemerintahan diatas memiliki keterkaitan satu sama lain yaitu :

- 1) Fungsi pelayanan akan menumbuhkan keadilan dalam masyarakat.
- 2) Fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat.
- 3) Fungsi pembangunan akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat.

---

<sup>2</sup> Hatifah Sj. Sumarto, 2003. *inovasi, partisipasi dan Good Governace*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Hal, 105

Ketiga fungsi diatas fungsi pelayanan memegang peran yang paling penting dari suatu pemerintahan, khususnya pemerintahan yang ada didaerah, karena dari dalam pelayanan itu akan diketahui kualitas suatu pemerintahan begitu pula dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Siak.

Apalagi jika dilihat dari birokrasi pemerintah yang sekarang sedang berjalan, dituntut untuk menata kembali format organisasi pemerintahan dan aktivitasnya. Selama ini pemerintahan yang dijalankan belum dilaksanakan secara maksimal hal ini dikarenakan kinerja aparat yang masih lemah.

Pendukung keberhasilan suatu proses pendidikan tidak terlepas dari peran Dinas Pendidikan dalam memberikan pengawasan berlangsungnya pembelajaran serta Kurikulum yang solid, tenaga pendidik yang profesional, sarana pendidikan yang lengkap, suasana belajar yang tenang, tingkat inteligensi siswa yang diatas rata-rata. Namun demikian, proses pendidikan tetap berlangsung hingga saat ini meskipun tidak selalu didukung oleh faktor-faktor pendukung tersebut. Sehingga produk sumber daya manusia yang dikeluarkan menjadi lulusan yang tidak memiliki keterampilan khusus yang bisa diandalkan untuk menopang kehidupannya di masa yang akan datang. Secara garis besar pendidikan terlihat secara umum pola pendidikan masih mengacu pada kuantitas peserta didik, belum memikirkan kualitas. Sehingga proses pendidikan berjalan tidak maksimal sebagaimana yang diharapkan. Cenderung peserta didik hanya menghabiskan waktu datang kesekolah dan pulang tanpa memiliki bekal ilmu yang secara pasti bisa di aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang lebih parah lagi di

daerah-daerah terpencil dan jauh dari jangkauan pembangunan. Kesemua faktor pendukung itu kadang-kadang tidak dimiliki sama sekali.

Dinas Pendidikan merupakan salah satu Organisasi Pemerintahan yang memiliki tugas bantuan Bupati melalui sekretaris daerah melaksanakan otonomi daerah bidang pendidikan yang dalam pelaksanaannya tetapi menggunakan azas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 64 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Siak pada pasal 3 dikatakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 64 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Siak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Pasal 4 Point d Bidang Sekolah Dasar (SD) mempunyai uraian tugas meliputi mengembangkan, memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan Pendidikan Sekolah Dasar. Membangun Meningkatkan Peran Serta Masyarakat (PSM), menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Bidang Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud melaksanakan sebagai tugas :

1. Mengembangkan yaitu, Kurikulum yang digunakan, Sumber Daya Manusia, dan penyediaan Sarana prasarana pendukung kegiatan pembelajaran.
2. Memantau yaitu Proses belajar, Kegiatan mengajar dan Kesidiplinan guru pengajar.
3. Mengendalikan yaitu Perkembangan kegiatan pembelajaran, Perkembangan Guru mengajar, bentuk materi yang diajarkan.

4. Menilai yaitu menilai keberhasilan sekolah didalam meningkatkan pendidikan, Kinerja guru, Penerapan mutu Pendidikan.

Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan mengkoordinasikan penyusunan rencana pelaksanaan penetapan kegiatan kurikulum dan kesiswaan, penyusunan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasaran pendidikan serta peningkatan/pemberdayaan tenaga teknis pendidik dan kependidikan pada jenjang SD.

Dinas Pendidikan Kabupaten Siak yang didasarkan ketetapan peraturan yang bertujuan agar terarahnya kinerja guru pengajar yang memiliki wawasan pengetahuan dan potensi secara luas didasarkan kurikulum dan peraturan yang telah ditetapkan. Adapun Peran Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kandis meliputi :

**Tabel I.1 : Bentuk Pembinaan Dan Pelatihan Guru Pengajar Sekolah Dasar di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak 2018**

No	Pembinaan dan Pelatihan	Data Pembinaan Pelatihan	
		Jumlah Pegawai	Pelaksanaan Pembinaan Pelatihan
			Jadwal
1	Disiplin Guru	4	Setiap 1 Bulan
2	Materi disampaikan	5	Setiap 6 Bulan
	<b>Pelatihan</b>		
1	Kurikulum SD	5	Setiap 6 Bulan
2	Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid	6	Setiap 2 Bulan
Jumlah		20	14Bulan

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019*

Berdasarkan penjelasan diatas Bentuk Pembinaan Dan Pelatihan Guru Pengajar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Siak di Kecamatan Tampan Kabupaten Siak Tahun 2018 melalui bentuk Pembinaan meliputi disiplin guru,

materi disampaikan, Pelatihan meliputi bentuk Kurikulum SD, Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid dengan jumlah pegawai sebanyak 20 orang.

Perlu disadari bahwa untuk dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan di sekolah, unsur manusia merupakan unsur yang sangat penting, karena kelancaran pelaksanaan program-program sekolah tergantung kepada orang-orang yang melaksanakannya. Dengan demikian, hal tersebut harus betul-betul disadari oleh semua personil sekolah, sehingga dengan segala kemampuannya dengan bimbingan kepala sekolah akan terus berupaya mengelola sumber daya yang ada untuk pengembangan sekolah.

Kelangsungan organisasi Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugas pokok yang diembannya di tangan eksistensi sebagai publik service atau pelayanan kepentingan masyarakat, tentu tidak mungkin dilaksanakan oleh pimpinan seorang. Artinya dibutuhkan berbagai satuan/unit kerja yang terjalin dengan kerjasama serta terakumulasi melalui susunan organisasi. Dari pelaksanaan pelayanan yang diberikan Dinas Pendidikan melalui tugas dan fungsi diatas terdapat berbagai program kerja dibidang pendidikan yang telah dirumuskan oleh Dinas Pendidikan.

Berikut adapun Jumlah murid, ruangan belajar serta jumlah tenaga pendidikan di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak 2016 sebagai berikut :

**Tabel I.2 Jumlah Sekolah Dasar di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak 2018**

No	Nama Sekolah Dasar (SD/MI)	Jumlah Murid
1	SD Negeri 01 Telaga Sam-sam	618
2	SD Negeri 02 Kandis Kota	512
3	SD Negeri 03 Kandis	590
4	SD Negeri 04 Sam-sam	463
5	SD Negeri 05 Sam-sam	561
6	SD Negeri 06 Blutu	449

1	2	3
7	SD Negeri 07 Sam-sam	315
8	SD Negeri 08 Sam-sam	424
9	SD Negeri 09 Simpang Blutu	449
10	SD Negeri 10 Blutu	468
11	SD Negeri 11 Blutu	295
12	SD Negeri 12 Blutu	233
13	SD Negeri 13 Blutu	156
14	SD Negeri 14 Blutu	289
15	SD Negeri 15 Blutu	356
16	SD Negeri 16 Bekalar	153
17	SD Negeri 17 Sam-sam	430
18	SD Negeri 18 Bekalar	613
19	SD Negeri 19 Sam-sam	329
20	SD Negeri 20 Kandis	389
21	SD Negeri 21 Blutu	334
22	SD Negeri 22 Bekalar	289
23	SD Negeri 23 Kandis Kota	608
24	SDS Karyati	127
25	SDS YP GKPI	176
26	SDS Ariska	256
27	SDI AL- Hikma	289
28	SDS Pelitahati	154
29	SDS Asy Syafa'at	280
30	MIS Amanah	127
31	MIS Muqorrobin	235
Jumlah		11.313

**Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, 2018**

Berdasarkan tabel diatas Jumlah Sekolah Dasar di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak 2016 yang terdiri dari 23 Sekolah Dasar Negeri dan 8 Sekolah Dasar Swasta dengan jumlah keseluruhan sebanyak 9.470 Sekolah Dasar. Hal ini perlunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak lebih Meningkatkan pebinaan dan pelatihan terhadap sekolah Dasar yang ada sehingga mutu pendidikan lebih baik.

Adapun berikt jumlah Sekolah Dasar, Murid, Ruangn Belajar Serta Jumlah Tenaga Pendidikan di Kecamatan Kandis tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel I.3 Jumlah Sekolah Dasar, Murid, Ruangan Belajar Serta Jumlah Tenaga Pendidikan di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak 2019**

No	Jumlah Sekolah		Jumlah murid		Jumlah ruang belajar		Jumlah tenaga pendidikan			
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri		Swasta	
							PNS	Honor	PNS	Honor
1	23	8	9438	1875	290	71	201	166	0	91
	31		11.313		361		458			

*Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, 2019*

Berdasarkan tabel diatas dimana diketahui Jumlah murid, ruangan belajar serta jumlah tenaga pendidikan di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak 2016 dengan jumlah sekolah negeri dan swasta sebanyak 31 sekolah, jumlah murid 11.313, jumlah ruang belajar 361, dan jumlah tenaga pendidikan 458. Hal ini terlihat begitu pesatnya jumlah sekolah tentunya Dinas Pendidikan dapat memberikan pembinaan dan pengawasan dalam kelangsungan pembelajaran dalam Meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kandis. Peningkatan pendidikan oleh Dinas Pendidikan belum terlihat memberikan peningkatan mutu pendidikan melalui pengawasan pembinaan serta pelatihan serta pendukung pembelajaran seperti sarana prasarana yang belum memadai serta guru pengajar secara merata.

Keseluruhan program yang menjadi tugas aparaturnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, diindikasikan belum tereliasasi secara optimal sesuai dengan Kurikulum 2013 yang mengarah terhadap aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Kurangnya pengawasan terhadap kegiatan pembelajaran terhadap tenaga pendidikan sehingga kegiatan mengajar berjalan begitu saja sehingga pencapaian pendidikan tidak diperhatikan terutama Sekolah Dasar yang ada dipedalaman Desa. Sarana Prasaran

penunjang aktifitas pembelajaran masih belum terealisasi dengan baik dimana fasilitas kegiatan pembelajaran seperti meja, papan tulis alat tulis mengajar serta computer masih belum memadai secara merata di Sekolah Dasar terutama dipedalam Desa yang seharusnya Dinas Pendidikan dapat membenahi serta menyediakan apa yang menjadi aspek ketertinggalan dalam pencapaian mutu pendidikan sehingga kondisi demikian mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas kegiatan pembelajaran. Berdasarkan penjelasan diatas adapun fenomena peran dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Kecamatan Kandis sebagai berikut :

- a. Diketahui Pembinaan yang diberikan Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Siak terhadap guru pengajar didalam meningkatkan mutu pendidikan belum terlaksana secara merata terhadap sekolah Dasar yang ada di Kecamatan kandis, sehingga kegiatan pengajaran yang diberikan guru kebanyakan hanya dalam bentuk tugas semata melainkan tidak mengarah memberikan potensi mutu kegiatan pembelajaran terhadap siswa.
- b. Diketahui pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak terhadap kegitan Pendidikan Sekolah Dasar belum terlaksana secara merata didalam kegiatan proses belajar, kegiatan belajar, kesidiplinan guru pengajar sehingga dinilai belum tercerminya mutu pendidikan yang berdasarkan penetapan kurikulum yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelaksanaan tugas bidang Pendidikan Sekolah Dasar belum optimal terealisasi

secara optimal, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Dinas Pendidikan belum memberikan perataan pembinaan terhadap guru pengajar di Sekolah Dasar Kecamatan Kandis berdasarkan kurikulum yang ditetapkan.
2. Kurangnya jumlah tenaga pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Siak didalam pembinaan guru guna agar meratanya pembinaan yang diberikan.
3. Belum terciptanya pengawasan hasil kegiatan pembelajaran guru sehingga sebagian guru mengajar belum merepakan pengajaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

#### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian tersebut diatas kemudian penulis dapat merumuskan masalah yang perlu untuk dikajikan pembahasan penelitian. Adapun masalah yang dirumuskan dalam penelitian tesis ini adalah **“Bagaimanakah Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis”**

#### **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini dibatasi masalah sebagai berikut :

1. Bentuk pembinaan yang diberikan Terhadap Guru Sekolah Dasar Mengajar.
2. Penataan tatacara pengajaran dan pemberian materi keterkaitan pembelajaran yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Kecamatan Kandis.
3. Memantau dan pengawasan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam kegiatan berlangsungnya pembelajaran disekolah.
4. Menilai hasil kegiatan pembelajaran yang telah terlaksana.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan pokok masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui Hambatan dan Kendala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pengembangan ilmu Pemerintahan dan dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian khususnya dibidang ilmu Pemerintahan.

2. Guna akademis, yaitu penelitian ini di harapkan menjadi bahan informassi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
3. Guna praktisi, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi dinas perdagangan dan perindustrian kota pekanbaru Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Musanef dalam Syafiie mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai berikut <sup>3</sup>:

1. Suatu Ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan ke dalam dan keluar, atau
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat di hindari timbulnya pertentangan- pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Rosenthal dalam Ndraha merumuskan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses itu secara internal maupun eksternal. Sedangkan Brasz merumuskan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari cara bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan umum itu di susun dan difungsikan, baik secara internal dan maupun eksternal, yaitu terhadap warga negara.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Syafiie Inu Kencana, 2003, *Ilmu Pemerintahan (Edisi Refisi)*, Bandung, Mandar Maju, Hal 32.

<sup>4</sup> Ndraha Taliziduhu, 2005, *Kybernologi (beberapa Konstruksi Umum)*, Tangerang Banten, Sirao Credentia Center, Hal.321

Selanjutnya Syafie, mendefinisikan ilmu pemerintahan mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang di perintah.<sup>5</sup>

Menurut Ndraha, Pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan dengan tuntunan yang di perintah.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Iver dalam Syafie, pemerintah yaitu sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah.<sup>7</sup>

Lebih lanjut Strong dalam pemuji, memberikan defenisi pemerintahan yaitu organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Sedangkan pemerintahan adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintahan).<sup>8</sup>

Pemerintahan menurut suryaningrat adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Sedangkan pemerintahan adalah perbuatan atau cara atau urusan pemerintahan.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Syafie Inu Kencana, *Op.cit* Hal.36.

<sup>6</sup> Ndraha Taliziduhu, 2003, *Kybernologi(Illmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta Rineka Cipta, Hal 6.

<sup>7</sup> Syafie Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung PT. Refika Aditama, Hal 22.

<sup>8</sup> Pamuji, 1992, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, Hal 23.

<sup>9</sup> Suryaningrat, 1992, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta Hal 10-11.

Sedangkan menurut Sedarmayanti Pemerintahan atau Government yaitu suatu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Sedangkan pemerintahan atau Governance adalah tindakan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.<sup>10</sup>

Lebih lanjut Sedarmayanti mengatakan bahwa pemerintahan yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup<sup>11</sup>:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Rasyid berpendapat bahwa ada tiga fungsi hakiki pemerintahan yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*) dengan tujuan masing-masing.<sup>12</sup> Pelayanan akan membuahkan keadilan, pemberdayaan akan mendorong kemandirian, dan pembangunan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Aparatur pemerintahan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diambil sumpah jabatannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik pada dirinya sendiri, orang lain (masyarakat) dan kepada Tuhan nya (Allah) dengan sebaik-baiknya guna mensejahterakan masyarakat banyak, sebagai mana

---

<sup>10</sup> Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bandung. Mandar Maju, Hal 35.

<sup>11</sup> Ibid. Hal 9.

<sup>12</sup> Ndraha Taliziduhu, 2008, *Kibernetologi dan Kepamongpraajaan*, Banten, Sirao Credantia Center, Hal 174.

<sup>13</sup> Rasyid M. Ryaas, 2007, *memaknai Fungsi Pemerintahan*, Cetakan VI, Jakarta, Penerbit PT. Mutiara Sumber Widya, Hal 89

sesuai dengan fungsi dari pemerintahan itu sendiri, sebagaimana seperti yang telah dijelaskan diatas.

Terselenggaranya *Good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>14</sup>

## 2. Konsep Organisasi Pemerintahan

Organisasi menurut siagian adalah setiap bentuk persekutuan antara dua atau lebih yang berkerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atau dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Atau lebih dikenal dengan tingkatan manajemen damorganisasi, yang terdiri dari top manajemen midle manajemen, dan lower manajemen.<sup>15</sup>

Waldo (dalam syafie) organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan orang-orang pada suatu system administrasi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bandung, Mandar Maju, Hal. 9.

<sup>15</sup> Sondang, P Siagian. 2009. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Bumi aksara. Hal, 65

<sup>16</sup> Syafie Inu Kencana. 2003. *Sistem administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta, Bumi Aksara,. Hal, 104

Menurut Hamim organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, memberi saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.<sup>17</sup>

Selanjutnya Zulkifli organisasi adalah sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang berkerja sama dan secara formal terkait dalam rangka pencapain suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.<sup>18</sup>

Titik tolak yang sekitarnya tepat digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan administrasi dilihat dari aspek kelembagaannya adalah pemahaman tentang prinsip-prinsip organisasi dan penerapannya. Sepuluh prinsip yang menonjol menurut Siagian adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Kejelasan tujuan. Tujuan merupakan sesuatu hal yang harus dicapai organisasi.
2. Kejelasan misi. Misi merupakan langkah utama yang harus dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan.
3. Fungsionalisasi. Besarnya organisasi berangkat dari banyaknya fungsi yang harus diselenggarakan, fungsi pelayanan, pengaturan, maupun pembangunan
4. Pembagian tugas. Merupakan kosekuensi organisasi dalam pembagian tugas yng baik.
5. Departementalisasi. Semua tugas yang harus dilaksanakan dikelompokkan kedalam departemen.
6. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Dengan tujuan meminimalisir adanya kecendrungan menyalah gunakan wewenang.

<sup>17</sup> Hamin, Sufiyen. 2005. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen (Studi Ilmu, Teori Konsep dan Aplikasi)*. Bandung : Multi Grapindo. Hal, 24

<sup>18</sup> Zulkifli, 2005. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru : UIR PRESS. Hal, 89

<sup>19</sup> Sondang, P Siagian. 2009. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Bumi aksara. Hal, 106

7. Kesatuan arah. Semua kegiatan organisasi harus mengarah terhadap pencapaian tujuan secara komprehensif.
8. Kesatuan komando. Agar para pelaksanaan dalam menjalankan tugasnya tidak mengalami kebingungan.
9. Kejelasan kebijakan tentang pola pengambilan keputusan. Baik sentralisasi maupun desentralisasi.
10. Rentangan kendali. Pengawasan yang dilakukan dalam waktu tertentu terhadap aktivitas anggotanya.

Menurut Ati Cahayani secara sederhana, organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada. Organisasi adalah suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama dengan ciri :<sup>20</sup>

- a. Terdiri dari pada dua orang atau lebih
- b. Ada kerjasama
- c. Ada komunikasi antar satu anggota dengan yang lain
- d. Ada tujuan yang ingin dicapai.

Penjelasan diatas defenisi bahwa yang dimaksud dengan organisasi adalah keseluruhan dari pada sumber-sumber baik yang bersifat manusia maupun yang non-manusia, serta pengelompokkan dari pada tugas dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau dengan kata lain organisasi adalah ajang, jaringan tata kerjasama kelompok orang-orang secara teratur dan continue untuk mencapai tujuan-tujuan bersama yang telah ditentukan, dimana didalamnya selalu terdapat tata cara dan hubungan antara atasan dan bawahan.

---

<sup>20</sup>Cahayani, Ati. 2003, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta PT Gramedia Widiasama. Hal, 8

Fatah Istilah organisasi menurut Nanang Fatah memiliki dua pengertian umum yakni :<sup>21</sup>

- a. Organisasi sebagai lembaga atau kelompok fungsional seperti perusahaan, sekolah, perkumpulan atau badan-badan pemerintahan
- b. Merujuk pada proses pengorganisasian yaitu bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan diantara para anggota, sehingga tujuan organisasi tercapai secara efektif.

Kartini Kartono suatu organisasi memiliki sedikitnya 3 tingkatan manajeral sebagaimana dikemukakan oleh Kartini Kartono mencakup :<sup>22</sup>

- a. Tingkatan institusional yang membahas hal-hal strategis
- b. Tingkatan manajerial, yang berkaitan dengan pengkoordinasian dengan bagian-bagian dalam organisasi
- c. Tingkatan operasinal, yang membahas pekerjaan.

Apabila ditinjau dari adanya pembagian tugas kerja antara unsur pelaksana dan unsur bantuan maka digunakan dasar perorganisasian berdasarkan pendekatan staff dan sehingga ditingkat atas terlihat adanya pihak-pihak yang memberikan pelayanan teknis dan administratif. Menurut Gibson, organisasi dapat diartikan dalam dua macam; yaitu :

- a. Dalam arti statis yaitu organisasi sebagai wadah tempat dimana kegiatan kerjasama dijalankan
  - b. Dalam arti dinamis yaitu organisasi sebagai suatu sistem proses interaksi antara orang-orang yang bekerjasama, baik formal maupun informal.
- Menurut Ibnu Syamsi bahwa organisasi mempunyai kesamaan (sinonim)

dengan beberapa hal berikut ini :<sup>23</sup>

- a. Institusi/lembaga  
Yaitu kelompok yang menampung aspirasi masyarakat; punya aturan tertulis atau tidak; tumbuh dalam masyarakat; mencapai tujuan bersama; dibentuk oleh pemerintah atau swasta
- b. Birokrasi

<sup>21</sup> Fatah Nanang, 2003. *Landasan Manajemen, Rosdakarya*, Bandung. Hal, 71

<sup>22</sup> Kartini Kartono, 2004, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta, Rajawali Pers. Hal, 169

<sup>23</sup> Ibnu Syamsi, 2004 , *Pokok-pokok Organisasi & Manajemen*, Jakarta : Rineka Cipta. 162

Administrasi dan manajemen; badan administrasi atau badan manajemen yaitu suatu badan yang menyelenggarakan suatu kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (baik dalam bidang pemerintahan maupun swasta) melalui sistem kerja yang berlandaskan suatu jaringan tata hubungan kerjasama sesuai dengan tata aturan dan prosedur yang ditentukan.

c. Organisasi formal

Organisasi yang memiliki struktur (bagan yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi). Suatu organisasi harus memuat 4 unsur utama, yaitu :

- 1) Berorientasi tujuan
- 2) Sistem hubungan sosial
- 3) *Structured Activities*
- 4) *Technological System*

Menurut Thoha Organisasi pemerintah dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, yaitu: melindungi kepentingan masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat, dan pada akhirnya tujuan yang paling utama adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Agar dapat mencapai tujuan organisasi pemerintah tersebut, maka organisasi pemerintah perlu dikelola dengan efektif.<sup>24</sup> Organisasi publik dikatakan efektif apabila dalam realita pelaksanaannya birokrasi dapat berfungsi melayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat (client), artinya tidak ada hambatan (sekat) yang terjadi dalam pelayanan tersebut, cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan, serta mampu memecahkan fenomena yang menonjol akibat adanya perubahan sosial (faktor eksternal) yang sangat cepat dan dari faktor internal.<sup>25</sup>

Agar organisasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan tujuan bersama, berbagai macam teori tentang organisasi disampaikan oleh para ahli. Salah satunya yang dikemukakan oleh Max Weber “Tipe Ideal Birokrasi”.

<sup>24</sup> Miftah Thoha, 2008. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. 2008. Jakarta: Kencana, Hal, 36

<sup>25</sup> Hessel Nogi S. 2005. Tangkilisan. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo hal 65

Organisasi yang efektif adalah organisasi yang memiliki struktur ideal dengan ciri-ciri: adanya pembagian kerja, adanya hierarki kewenangan yang jelas, adanya prosedur seleksi formal, adanya peraturan yang rinci, dan adanya hubungan kerja yang bersifat impersonal.

Dalam pembagian tugas untuk mewujudkan visi dan misi ini dapat diikuti tiga prinsip, yaitu: *Pertama*, berbagai tugas harus terdistribusi habis ke dalam unit-unit organisasi yang sudah ada (Dinas, Badan, dan Kantor); *Kedua*, untuk keperluan efisiensi beberapa unit organisasi yang sudah ada dapat digabungkan (*merger*); *Ketiga*, membentuk unit-unit baru apabila ada tugas-tugas baru yang harus dilakukan sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat yang tidak mungkin dilakukan oleh unit-unit yang sudah ada.<sup>26</sup>

### 3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Waluyo manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu dengan asas-asas manajemen adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Pembagian kerja
2. Wewenang dan tanggung jawab
3. Disiplin
4. Kesatuan perintah
5. Kesatuan arah
6. Kepentingan individu dibawah kepentingan umum
7. Gaji pegawai
8. Sentralisasi
9. Ketertiban

<sup>26</sup> Miftah Thoha. 2008. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*.2008.Jakarta: Kencana. Hal, 37-38

<sup>27</sup> Waluyo, 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Penerbit Mandar Maju; Jakarta. Hal, 81

10. Keadilan
11. Kestabilan masa kerja pegawai
12. Inisiatif
13. Kesatuan jiwa korp.

Menurut Zulkifly manajemen merupakan proses perencanaan, mengorganisasikan, dan menggunakan semua sumber daya manusia untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Batasan manajemen hingga saat ini belum ada keseragaman, namun selalu dan digunakan adalah: ketatalaksanaan, manajemen, management dan pengurusan. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda, maka kita pakai istilah aslinya yaitu manajemen mengandung tiga pengertian :<sup>28</sup>

- a) Manajemen sebagai suatu proses.
- b) Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen.
- c) Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.

Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga menghasilkan jasa yang efisien.

Sabarguna menjelaskan bahwa manajemen kinerja sekarang ini menjadi penting karena :

1. Adanya keterkaitan yang luas antara hasil kerja dan proses yang berlangsung.
2. Teknologi informasi menggambarkan keterkaitan lebih jelas dan mudah seperti keterkaitan bonus dengan pencapaian jumlah pelayanan.
3. Sistem informasi dengan bantuan model dapat melakukan proyeksi sebagai prediksi kinerja yang akan datang.

---

<sup>28</sup> Zulkifli, 2005. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru : UIR PRESS. Hal, 28

4. Model dapat disiapkan untuk mensimulasikan perubahan yang terjadi dan akibat bagi kinerja yang akan dicapai.

Dalam hal ini manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga menghasilkan jasa yang efisien.

Waluyo menyebut manajemen pemerintahan (*public management*) adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik (*public administration*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, manajemen pemerintahan, tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga negara dan masyarakatnya.<sup>29</sup>

Kusdi menyebut bahwa, tugas pemerintahan yang paling dominan adalah menyediakan barang-barang publik (*public utility*) dan memberikan pelayanan (*public service*) misalnya dalam bidang-bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, perkembangan perlindungan tenaga kerja, pertanian, keamanan dan sebagainya.<sup>30</sup>

Terminologi manajemen, sangat erat hubungannya dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara yang seefisien mungkin. Istilah

---

<sup>29</sup> Waluyo, 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Penerbit Mandar Maju; Jakarta. Hal, 63

<sup>30</sup> Kusdi, 2009, *Teori Organisasi dan Administrasi*, Penerbit Salemba Humanika; Jakarta. Hal, 76

pemerintahan seperti dijelaskan lebih lanjut oleh Kusdi dapat diartikan sebagai kegiatan lembaga-lembaga publik dalam mencapai tujuan negara.

Secara konseptual dari dua istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan mengandung arti sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan-tujuan negara dengan menggunakan sumber-sumber yang dikuasai negara.

Winardi menjelaskan bahwa, manajemen pemerintahan yang baik dapat dilihat dari dua sisi, yaitu :<sup>31</sup>

1. Dari proses; manajemen pemerintahan sebagai proses, harus lebih mengutamakan proses yang demokratis di atas segala rencana dan tujuan yang telah ditentukan.
2. Dari hasil; manajemen sebagai hasil akan menggambarkan kesungguhan hati, pemaknaan secara efisien akan sumber-sumber yang terbatas dengan mengutamakan administrasi yang baik di atas proses yang ada.
3. Manajemen pemerintahan yang baik dapat tercermin dari proses pengambilan keputusan yang demokratis

Hasibuan memberikan argumentasi bahwa manajemen pemerintahan sebagai proses pencapaian tujuan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, aparatur negara di masyarakat harus memperhatikan prinsip umum manajerial pemerintahan sebagai berikut.<sup>32</sup>

1. Adanya pembagian kerja
2. Kewenangan dan tanggung jawab yang jelas
3. Mekanisme kerja yang jelas
4. Penghargaan terhadap setiap anggota
5. Etos kerja yang tinggi
6. Penyesuaian terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik
7. Budaya kerja yang dilandasi nilai kejujuran yang tinggi
8. Antisipatif

<sup>31</sup> Winardi, 2010, *Asas-asas Manajemen*; Bandung, Hal, 65

<sup>32</sup> Hasibuan, H.Melayu, S.P. 2006. *Manajemen dasar, Pengertian & Masalah Edisi Ketujuh*. Jakarta, Bumi Aksara. Hal, 93.

Manajemen pemerintahan (*public management*) adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik (*public administration*) yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia pada umumnya dikaiSDan dengan aktifitas-aktifitas, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi untuk mencapai tujuan.

#### **4. Tugas dan Fungsi Pemerintah**

Menurut perspektif Kybernologi, tugas Pemerintah itu adalah pelayanan kepada manusia dan masyarakat.<sup>33</sup> Dibentuknya suatu system pemerintahan, pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah berfungsi sebagai provider yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.<sup>34</sup>

Fungsi pemerintah dibagi menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (*public service*), Pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Dengan mengutip Rosecelt dalam Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahnya. Artinya fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan,

---

<sup>33</sup> Ndraha Taliziduhu, 2005. Banten, Kybernologi Beberapa Konstruksi Utama, Jilid 1, Penerbit Sirao Credenntia, hal 192.

<sup>34</sup> Ndraha Taliziduhu, 2003. Jakarta, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru), Jilid 1, Penerbit rineka Cipta, hal 76

pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.<sup>35</sup>

Terkait dengan pelayanan, Ndraha lebih menitik beraSDan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa public. Layanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dilakukan terhadap orang perorangan, pribadi atau privat, sedangkan jasa public bersifat kolektif, karena itu bernilai istimewa. Fungsi ini kemudian melahirkan definisi penting tentang pemerintahan sebagai suatu ilmu, dimana pemerintahan mempelajari bagai mana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang atau jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintah sehingga diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.<sup>37</sup>

Hal senada juga Budiman Rusli, yang berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan, pelayanan menurutnya sesuai dengan *life xyle theory leadership* (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Rasyid, Muhammad Ryaas, 1998. Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia, Jakarta, Yarsif Watampone, hal 102.

<sup>36</sup> Ndraha Taliziduhu, 2003. *Jakarta, Budaya Organisasi*, Edii II, penerbit Rineka Cipta.

<sup>37</sup> L.P. Sinambela, 1992. *Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*, Edisi Desember, hal. 198

<sup>38</sup> Budiman Rusli, *Pelayanan Publik di era Reformasi*, www.pikiran-rakyat.com edisi 7 juni 2015.

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan public yang terjadi selama ini masih bercirikan : berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecendrungan itu sering terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” kepengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditunjukkan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap Negara. Meskipun Negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya. Artinya, birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.<sup>39</sup>

Osborne dan Plastrik mencirikan pemerintah (birokrat) sebagai mana diharapkan di atas adalah pemerintah milik masyarakat,<sup>40</sup> yakni pemerintahan (birokrat) yang mengalihkan wewenang control yang dimiliki kepada masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya control dari masyarakat pelayanan public akan lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik. Lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak karena itu harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan dapat menjadi lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan merancang model pelayanan yang lebih kreatif, serta lebih efisien.

<sup>39</sup> Inu Kencana Syafii, 1999, Ilmu Administrasi Publik, Jakarta : Rineka Cipta. hal. 103

<sup>40</sup> David Osborne, Peter Plastrik, 2004. Lima Strategi Menuju Pemerintah Wirausaha, Terjemahan Abdul Rosyid dan Ramelan, Jakarta, hal. 322-323

## 5. Konsep Kinerja Pemerintahan

Pengertian kinerja atau prestasi kerja adalah sebagian kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan.<sup>41</sup> Lebih tegas Lawler and Poter menyatakan bahwa kinerja adalah “*succesfull role achievement*” yang diperoleh seseorang dari perbuatan-perbuatannya.<sup>42</sup>

Dari batasan tersebut As’ad menyimpulkan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Kinerja atau prestasi kerja seseorang karyawan pada dasarnya adalah hasil kerja seseorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran atau kinerja yang terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.<sup>43</sup>

Keith Daxis merumuskan ada 4 (empat) sifat umum yang tampaknya mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi yaitu : kecerdasan, kedewasaan, kekeluasan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi, sikap-sikap hubungan komunikasi.<sup>44</sup>

Kemudian kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerja.<sup>45</sup> Selanjutnya kinerja (prestasi kerja) merupakan suatu asil kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan,

---

<sup>41</sup> Mohd. As’ad, *Psikologi Industri, Liberty*, Yogyakarta, 1991. Hal. 47.

<sup>42</sup> *Ibid.* Hal. 46-47

<sup>43</sup> John Suprihanto, dkk, *Seni Kepemimpinan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN*, Yogyakarta, 2003. Hal. 33.

<sup>44</sup> William A. Cohen, 1992, *Seni Kepemimpinan*, Jakarta, Mitra Utama, Hal. 228.

<sup>45</sup> Tisnawati Sule, *Emie dan Kurniawan Saefuulaah*, Pengantar Manajemen, Jakarta, Kencana Hal. 223

pengalaman dan kesungguhan serta waktu.<sup>46</sup> Selanjutnya kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang di tuntut dari seseorang, kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan. Selanjutnya karakteristik kinerja mengemukakan pendapatnya bahwa individu yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa karakteristik diantaranya berorientasi prestasi, memiliki percaya diri, pengendalian diri dan kompetensi.

Pencapaian kinerja dapat dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), secara teoritis tujuan penilaian dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluation dan development.

## 6. Konsep Kewenangan

Menurut Prajudi Atmosudirjo (2001; 2) kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon,

---

<sup>46</sup> Hasibuan Malayu. S.P, 2001, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Jakarta, PT. Bumu Aksara, Hal. 34.

jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>47</sup>

Perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

---

<sup>47</sup> Mathis R.L dan Jackson J.H., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Salemba Empat. Tahu 2002. Hal. 76

<sup>48</sup> Syafaruddin., *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Konsep, Strategi dan Aplikasi*. Jakarta : Grasindo. 2002. Hal76

## 7. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.<sup>49</sup>

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:

- a. Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah;

---

<sup>49</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

- c. Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan di daerah;
- d. Teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah;
- e. Tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan
- f. Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam system administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>50</sup>

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu

---

<sup>50</sup> Wahab S.A., *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*, Jakarta, Bumi Aksara. Tahun 2004. Hal 88

penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusanpemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.<sup>51</sup>

Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintah, dan penugasan, dan tugas pembantu juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif. Berikut akan dijabarkan lebih lanjut berkenaan dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi.<sup>52</sup> Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (PP 7/2008), meliputi:

- a. Pelimpahan urusan pemerintahan;
- b. Tata cara pelimpahan;
- c. Tata cara penyelenggaraan; dan

<sup>51</sup> Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

<sup>52</sup> Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

d. Tata cara penarikan pelimpahan.

Pengelolaan dana dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) Prinsip pendanaan;
- 2) Perencanaan dan penganggaran;
- 3) Penyaluran dan pelaksanaan; dan
- 4) Pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi.

Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. Penyelenggaraan dekonsentrasi; dan
- b. Pengelolaan dana dekonsentrasi.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) Penugasan urusan pemerintahan;
- 2) Tata cara penugasan;
- 3) Tata cara penyelenggaraan; dan
- 4) Penghentian tugas pembantuan.

Pengelolaan dana tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. Prinsip pendanaan;
- b. Perencanaan dan penganggaran;
- c. Penyaluran dan pelaksanaan; dan
- d. Pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan.

Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP

7/2008 meliputi:

- a. Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- b. Pengelolaan dana tugas pembantuan.

Pelimpahan Urusan Pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi berdasarkan Pasal 11 PP 7/2008 meliputi: (1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur. (2) Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan pemerintah dapat pula dilimpahkan kepada: (a) instansi vertikal; (b) pejabat Pemerintah di daerah. Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintahan provinsi.

Untuk urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepada gubernur dalam Pasal 13 ayat (3) PP 7/2008, didanai dari APBN bagian anggaran

kementerian/lembaga melalui dana dekonsentrasi. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non-fisik. Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara. Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana dekonsentrasi merupakan barang milik negara. Barang milik negara tersebut dapat dihibahkan kepada daerah.

Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Kepala SKPD provinsi bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan dekonsentrasi. Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dekonsentrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan dana dekonsentrasi.

Berkenaan dengan tugas pembantuan, pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Pemerintah provinsi, juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi, serta, Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan

kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan diluar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah provinsi. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBD provinsi. Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa didanai dari APBD kabupaten/kota.

Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana tugas pembantuan merupakan barang milik negara. Barang milik negara

dapat dihibahkan kepada daerah. Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang dalam Pasal 57 ayat (2) PP 7/2008, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah. Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan juga mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang tugas pembantuan bertanggung jawab atas pelaksanaan dana tugas pembantuan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan berupa pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di

bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern Pemerintah.

## 8. Konsep Pembinaan

Pembinaan menurut Widjaja adalah suatu proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha perbaikan, dan akhirnya mengembangkan, dengan demikian pembinaan adalah sejauh mana usaha dari kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin.

Hidayat mendefinisikan pembinaan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur, dan terarah, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subjek didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, bimbingan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>53</sup>

1. Memberi pengarahan
2. Memberi bimbingan
4. Melakukan pengawasan
5. Memberikan pendidikan dan pelatihan
6. Memberi buku petunjuk
7. Memberi intruksi-intruksi

Pembinaan juga merupakan bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar dia mencapai kedewasaan. Secara sederhana pembinaan merupakan suatu aktivitas sadar dari orang dewasa guna

---

<sup>53</sup> Hidayat. 2000. *Organisasi Publik*, Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal, 26

membantu dan membimbing orang yang belum dewasa agar menjadi dewasa, baik jasmani maupun rohani.

Menurut Efendi Pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan perbaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk di dalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal.<sup>54</sup>

Menurut Ismail mendefinisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima dan pekerja akhir (masyarakat) dan tujuan pembinaan adalah supaya masyarakat dapat Meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih sejahtera dan sempurna.<sup>55</sup>

Menurut Thoha pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atau berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan perbaikan atas sesuatu.<sup>56</sup>

## 9. Konsep Pelatihan

Pelatihan didefinisikan oleh Ivancevich sebagai “usaha untuk Meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam

---

<sup>54</sup> Efendi, Mahrizal, 2003. *Pembinaan Ekonomi dan budaya indonesia*. Jakarta ; Balai Pustaka. Hal, 24

<sup>55</sup> Ismail, Maimunah, 2001, *Pengembangan Implikasi Keatas Pembangunan Masyarakat*. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Indonesia, Kuala Lumpur. Hal, 154

<sup>56</sup> Miftha Thoha, 1994. *Kepemimpinan dalam Manajemen (Suatu Pendekatan Perilaku)*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Hal,7

pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera”. Selanjutnya, sehubungan dengan definisinya tersebut, Ivancevich mengemukakan sejumlah butir penting yang diuraikan di bawah ini: Pelatihan (*training*) adalah “sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha Meningkatkan kinerja organisasi”. Pelatihan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pelatihan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.<sup>57</sup>

Pelatihan menurut Gary Dessler adalah Proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang, ketrampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka”. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam Meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Karyawan, baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya.<sup>58</sup>

Tujuan umum pelatihan sebagai berikut : (1) untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif, (2) untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional, dan (3) *untuk mengembangkan sikap*, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan manajemen (pimpinan).

---

<sup>57</sup> Ivancevich, John, M, dkk. 2008. Perilaku dan Manajemen Organisasi, jilid 1 dan 2 Jakarta : Erlangga. Hal, 72

<sup>58</sup> Dessler, Gary. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Index. Hal. 102

Sedangkan komponen-komponen pelatihan sebagaimana dijelaskan oleh Mangkunegara terdiri dari :<sup>59</sup>

- 1) Tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan harus jelas dan dapat di ukur
- 2) Para pelatih (trainer) harus ahlinya yang berkualitas memadai (profesional)
- 3) Materi pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak di capai
- 4) Peserta pelatihan dan pengembangan (trainers) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Dalam pengembangan program pelatihan, agar pelatihan dapat bermanfaat dan mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang sistematis. Secara umum ada tiga tahap pada pelatihan yaitu tahap penilaian kebutuhan, tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap evaluasi. Atau dengan istilah lain ada fase perencanaan pelatihan, fase pelaksanaan pelatihan dan fase pasca pelatihan.

Mangkunegara menjelaskan bahwa tahapan-tahapan dalam pelatihan dan pengembangan meliputi : (1) mengidentifikasi kebutuhan pelatihan / need assesment; (2) menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan; (3) menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya; (4) menetapkan metode pelatihan; (5) mengadakan percobaan (try out) dan revisi; dan (6) mengimplementasikan dan mengevaluasi.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Mangkunegara, Anwar Prabu., 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung : Refika Aditama. Hal. 67

<sup>60</sup> Mangkunegara, Anwar Prabu. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung : Refika Aditama. 2005. Hal. 57

## 10. Peranan

Peran adalah suatu konsep fungsional yang menegaskan fungsi atau tugas seseorang dan dibuat atas dasar tugas nyata yang dilakukan oleh seseorang.

Menurut Soekanto (unsur – unsur peranan atau (*role*) adalah :<sup>61</sup>

1. Aspek dinamis
2. Perangkat hak – hak dan kewajiban
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
8. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang

Peranan ( *Role* ) merupakan aspek dinamis kedudukan ( *status* ). Apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain, tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam – macam peranan yang berasal dari pola – pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan – kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Hubungan – hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan – peranan individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan berbagai suatu proses.

Jadi peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

---

<sup>61</sup> Soekanto, Soerjono. 2004. Sosiologi suatu pengantar. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal. 234

Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang – orang disekitarnya yang tersangkut, atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai – nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak.

Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :<sup>62</sup>

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapat dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapat masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini dalah bertukar pikiran dan pandangan dapat Meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess).
- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Menurut Karl konsep peranan itu berkaitan dengan kegiatan seseorang dengan kegiatan dalam kedudukan tertentu baik dalam system masyarakat maupun dalam organisasi. Selanjutnya, mereka menyimpulkan peranan adalah

---

<sup>62</sup> Arimbi, Achmad Santosa. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi. 2003. Hal 45

perilaku yang langsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi.<sup>63</sup>

Menurut Gibson peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan dua system yang berbeda, biasanya organisasi dan beberapa dari bagian lingkungan.<sup>64</sup>

### 11. Mutu Pendidikan

Pengukuran mutu dari sisi produsen (sekolah) menurut Hari Suderadjat disebut *quality in fact* sedangkan pengukuran mutu dari sisi pelanggan disebut sebagai *quality in perception*. Adapun standar yang dipakai pengukuran *quality in fact* adalah standar proses dan pelayanan, yakni yang sesuai dengan spesifikasi dalam perencanaan, cocok dengan tujuan dan dilaksanakan dengan tanpa kesalahan (*zero defect*) atau mengerjakan sesuatu yang benar sejak pertama dan seterusnya (*right first time and every time*). Standar yang digunakan untuk pengukuran *quality in perception* adalah standar pelanggan, yakni kepuasan pelanggan yang dapat Meningkatkan permintaan dan harapan pelanggan (Hari Suderadjat, 2005 : 2).<sup>65</sup>

Mutu merupakan suatu keadaan yang esensi dalam segala hal, termasuk dalam dunia pendidikan. Karena pendidikan di sekolah yang tidak bermutu lambat laun akan mati ditinggalkan pelanggannya dan kalah bersaing oleh penyelenggara pendidikan yang bermutu. Mengingat esensinya masalah mutu, ditegaskan oleh

<sup>63</sup> Karl, Fremont E. *Organisasi dan Manajemen (edisi 4)*. Bumi Akasara. Jakarta. 2002. Hal.,97.

<sup>64</sup> Gibson, Ivancevich Donelly. *Organisasi*, Bina Rupa Aksara. Jakarta. 2007. Hal. 479.

<sup>65</sup> Suderadjat, Hari. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Bandung : Cipta Cekasa Grafika. 2005. Hal. 2.

Syafaruddin bahwa : “Konsep sekolah bermutu (unggul) perlu ada dalam konsep setiap kepala sekolah.”<sup>66</sup>

Dalam upaya mencapai lulusan yang bermutu tentu harus melalui tahap proses yang bermutu, yakni memberikan layanan pendidikan dengan mengerahkan segala sumber daya sebagai pendukungnya, baik sumber daya material maupun nonmaterial. Sejalan dengan itu, Syafaruddin menjelaskan sebagai berikut :<sup>67</sup>

Tuntutan terhadap pelayanan terbaik juga menjadi perhatian manajemen mutu terpadu, tak terkecuali dalam pendidikan. Sekolah-sekolah pada dewasa ini tidak hanya cukup menawarkan program studi dengan kurikulum tertentu, orang tua dan pelajar menjadi puas. Akan tetapi, sekolah juga harus menyediakan alat-alat belajar dan mengajar yang relevan dengan perkembangan zaman untuk mendukung kemajuan proses pembelajaran dan pengajaran. Gedung sekolah yang bagus diisi dengan sarana dan fasilitas belajar yang baik dan fungsional, tempat bermain pelajar, serta pelayanan yang prima terhadap pelajar, guru, orang tua, dan masyarakat. Situasi dan kondisi sekolah yang kondusif akan memberikan kontribusi positif bagi mutu proses dan mutu produk (lulusan) sekolah.

Sesuai dengan gambaran tersebut di atas dapat dikatakan bahwa layanan pendidikan mencakup dimensi proses dan dimensi sarana prasarana. Proses berupa pelaksanaan pembelajaran, metode, komunikasi, motivasi, dan sebagainya. Sarana prasarana berupa alat-alat pembelajaran, gedung, dan lingkungan sekolah yang kondusif.

Bermutu atau tidaknya proses dan sarana prasarana pendidikan sebagai indikator dalam layanan pendidikan dapat dibandingkan dengan standar yang tertuang dalam PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang di dalamnya mencakup standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga

---

<sup>66</sup> Syafaruddin. *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Konsep, Strategi dan Aplikasi*. Jakarta : Grasindo. 2002. Hal. 34.

<sup>67</sup> Ibit , 37

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Apabila sarana prasarana, dan proses yang dilakukan telah sesuai dengan rencana dan harapan pelanggan, maka layanan pendidikan dapat memuaskan produsen maupun pelanggan. Dengan kata lain, layanan pendidikan yang bermutu adalah layanan pendidikan yang sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan.

Permasalahan-permasalahan yang dapat muncul dari konteks mutu layanan pendidikan dikaitkan dengan desentralisasi pendidikan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Yakni masalah kurikulum, tenaga kependidikan, pengelolaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, proses pembelajaran, dan penilaian. Dilihat dari kaca mata nasional, regional, apalagi global sebagai efek sampingnya dikhawatirkan bahwa mutu pendidikan yang bersifat kedaerahan ini kurang kompetitif secara global. Permasalahan-permasalahan tersebut sejalan dengan permasalahan yang dikemukakan oleh E. Mulyasa sebagai berikut :<sup>68</sup>

Masalahnya adalah bagaimana menjamin divaritas yang disebabkan oleh adanya konteks lokalitas yang cenderung memunculkan kriteria lokal. Lebih lanjut perlu dipikirkan pengembangan standar kinerja pendidikan yang memenuhi tuntutan keunggulan kompetitif dan komparatif dalam konteks nasional bahkan internasional.

Indikator untuk mengukur dimensi-dimensi mutu layanan pendidikan sebagaimana tersebut di atas dapat mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

---

<sup>68</sup> Mulyasa, E. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2006. Hal. 18

Selain itu, juga harus memperhatikan kriteria-kriteria pendidikan yang baik, seperti dikemukakan dalam Renstra Depdiknas 2005-2009 sebagai berikut :<sup>69</sup>

Program dan latihan kegiatan pendidikan yang baik memiliki lima kriteria yang bisa disingkat dengan SMART (specific, measurable, achievable, realistic, timebound). Kriteria tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan indikator kinerja pendidikan yang terukur dan yang dapat dicapai sebagai target/sasaran masing-masing program.

Sekolah sebagai suatu organisasi yang memberikan jasa layanan pendidikan, mempunyai tujuan yang diharapkan tercapai secara optimal. Itulah sebabnya, dilakukan berbagai upaya untuk Meningkatkan mutu elemen-elemen yang ada di dalamnya. Secara umum unsur-unsur yang ada dalam organisasi sekolah ini terdiri dari tiga dimensi yaitu masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*).

1. *Input*, meliputi peserta didik, kurikulum, dana, data dan informasi, pendidik dan tenaga kependidikan, motivasi belajar, kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan, sarana dan prasarana, serta lingkungan.
2. Proses, meliputi lama waktu belajar dan mengikuti pendidikan, kesempatan mengikuti pembelajaran, efektivitas pembelajaran, mutu proses pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran.
3. *Output*, meliputi jumlah siswa yang lulus atau naik kelas, nilai ujian, jumlah siswa yang bekerja dan diterima pada lapangan kerja, peran serta lulusan dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat.

Dari unsur-unsur tersebut di atas yang berkenaan dengan mutu layanan pendidikan adalah unsur masukan (*input*) dan unsur proses. Sedangkan mutu lulusan merupakan hasil dari layanan pendidikan yang bermutu, perwujudannya

---

<sup>69</sup> Depdiknas. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005 – 2009*. Jakarta : Pusat Informasi dan Humas Depdiknas. 2007. Hal. 84

dari unsur proses yang bermutu dengan didukung input yang bermutu. Dengan kata lain, mutu layanan pendidikan diperoleh dari hasil pengelolaan input dan proses pendidikan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu.

### B. Kerangka Pikir

**Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Tentang Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis**



*Sumber : Modifikasi Penelitian Penelitian, 2019*

### C. Konsep Operasional

Untuk Menghilangkan serta menghindari dari kesalah pahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Peranan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan tujuan yang akan dicapai dalam pencapaian mutu pendidikan.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Siak dalam penelitian ini adalah salah satu instansi pemerintah yang telah dilimpahkan kewenangan dalam memberikan pelayanan pendidikan diwilayanya.
3. Mutu Pendidikan dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Siak dalam Meningkatkan potensi pembelajaran terhadap murid melalui pemberian pembinaan dan pelatihan terhadap guru pengajar.
4. Mengembangkan pendidikan adalah pengembangan pembelajaran yang diberikan oleh Pendidikan melalui kurikulum yang berlaku di Sekolah Dasar Kecamatan Kandis.
5. Mengendalikan pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Siak memberikan pengendalian dalam mengevaluasi dan penataan tatacara pengajaran dan pemberian materi keterkaitan pembelajaran yang akan dilaksanakan.
6. Menilai pembelajaran dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan melihat sejauhmana perkembangan pembelajaran yang terlaksana di Sekolah Dasar di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

#### D. Operasional Variabel

**Tabel II. 1: Operasional Variabel penelitian Tentang Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
Peranan adalah perilaku yang langsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi Karl (2002:97)	Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis	Mengembangkan yaitu penetapan Kurikulum yang digunakan, Sumber Daya Manusia, dan penyediaan Sarana prasarana pendukung kegiatan pembelajaran.	a. Kurikulum SD. b. Sumber Daya Manusia pelaksana. c. Sarana prasarana.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Memantau yaitu Proses belajar, Kegiatan mengajar dan Kesidiplinan guru pengajar	a. Proses belajar b. Kegiatan mengajar. c. Kesidiplinan guru pengajar.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Mengendalikan yaitu Perkembangan kegiatan pembelajaran, Perkembangan Guru mengajar, bentuk materi yang diajarkan	a. Perkembangan SD b. Perkembangan Guru mengajar c. Materi yang diajarkan.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Menilai yaitu menilai keberhasilan sekolah didalam meningkatkan pendidikan, Kinerja guru, Penerapan mutu Pendidikan.	a. Menilai sekolah b. Kinerja guru. c. Mutu pendidikan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019*

#### E. Teknik Pengukuran

Untuk mengukur Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan ukuran variable penelitian yaitu :

Terlaksana :Apabila dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tampan 66%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak 33%-65%

Kurang Terlaksana :Apabila dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak 0%-32%

Katagori pengukuran untuk setiap indikator variable penelitian ini di uraikan sebagai berikut :

1. Mengembangkan dapat dikatakan gorikan:

Terlaksana :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-65%

Kurang Terlaksana :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%

2. Memantau dapat dikatakan gorikan:

Terlaksana :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-65%

Kurang Terlaksana :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%

3. Mengendalikan dapat dikatakan gorikan:

Terlaksana :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-65%

Kurang Terlaksana :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%

4. Menilai dapat dikatakan gorikan:

Terlaksana :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-65%

Kurang Terlaksana :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran.

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluru populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner yang dimaksud diatas untuk disebarakan kepada populasi yang sudah ditentukan.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian penulis lakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, dengan alasan berdasarkan pengamatan yang ditemukan dilapangan, Kurangnya Pengembangan, Memantau dan Mengendalikan pendidikan Sokolah Dasar sehingga mutu pendidikan tidak terlihat baik secara umum.

### C. Populasi dan Sampel Penelitian

Untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi, terdapat bermacam-macam cara yang dikemukakan para ahli. Namun dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel purposif dengan pertimbangan sampel lebih berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Sebagaimana pada teknik pengambilan sampel purposive, sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Penetapan ini lazimnya didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu. Jadi, tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik random (teknik acak).

Adalah jumlah keseluruhan suatu objek yang akan di teliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Siak melalui Kepala Dinas, Kabid Pendidikan Sekolah Dasar Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD, Seksi Ketenagaan, Seksi Sarana dan Prasarana SD, Tenaga Pengajar SD.

**Tabel III. 1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Dinas Pendidikan Kabupaten Siak 2018**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas.	1	1	100%
2	Kabid Pendidikan Sekolah Dasar			
3	Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD	1	1	100%
3	Seksi Ketenagaan	1	1	100%
4	Seksi Sarana dan Prasarana SD	1	1	100%
5	Tenaga Pengajar SD	458	30	6.5%
	Jumlah	462	34	-

*Sumber : Olahan Data penelitian, 2019*

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, pada Dinas Kabupaten Siak, digunakan penarikan sensus karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 4 sampel yang terdiri dari Dinas, Kabid Pendidikan Sekolah Dasar Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD, Seksi Ketenagaan, Seksi Sarana dan Prasarana SD, Tenaga Pengajar SD.

Sedangkan terhadap tenaga pengajar SD dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik penarikan sampel yang merupakan responden penelitian dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan menentukan responden yang berhubungan langsung dengan guru pengajar yaitu sampel yang diambil dianggap dapat mewakili seluruh jumlah populasi karena populasi jumlahnya sangat besar dengan jumlah 30 Sampel.<sup>70</sup>

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder yang dapat dibedakan :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari data narasumber yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan dalam penelitian yakni tentang Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis

---

<sup>70</sup> Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta. Hal, 62

Kabupaten Siak, dokumentasi dan wawancara berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur Organisasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang berwenang memberikan data seperti data kepegawaian, struktur organisasi, dan lain-lain baik berupa buku, dokumen, leaflet dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian.
2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara dan Kepala Bidang Sekolah Dasar dengan mengajukan pertanyaan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
3. Kuisioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaiman Peranan

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang di dapat dari guru pengajar dan pegawai Bidang Sekolah Dasar.

4. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Kecamatan Kandis, teknik ini digunakan untuk mendapat tentang keadaan lokasi penelitian.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis Data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di Interpretasikan. Analisis data dalam penelitian yang dilakukan berupa pengolahan data yang dilakukan dengan beberapa tahap yakni :

1. Tahap Pertama, dilakukan penyelesaian data primer dan data sekunder.
2. Tahap Kedua, data dan informasi yang telah diseleksi dikelompokkan sesuai dengan jenis atau bertujan berdasarkan pokok permasalahan kemudian dibuat analisis data.
3. Tahap Terakhir, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Pengolahan Data disajikan dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka-angka.

## H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Oktober sampai dengan bulan Maret 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																											
		Oktober				Nov				Des				Jan				Feb				Mar							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP																												
2	Seminar UP																												
3	Revisi UP																												
4	Revisi Quisioner																												
5	Rekomendasi Survy																												
6	Survy Lapangan																												
7	Analisis Data																												
8	Penyusunan Laporan hasil Penelitian (Tesis)																												
9	Konsultasi Revisi Tesis																												
10	Ujian Konfrehensif Tesis																												
11	Revisi Tesis																												
12	Penggandaan Tesis																												

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Diawal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah Pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak berdasarkan UU Nomor. 53 Tahun 1999.

Wilayah Kabupaten siak terletak pada dataran sisi timur pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Riau. Luas daerah ini adalah 8.556,09 km<sup>2</sup> yag terbagi ke dalam 13 kecamatan, yakni: Kecamatan Siak, Kecamatan Dayun, Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Sungai Mandau, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Minas, Kecamatan Tualang, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Kandis, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Mempura, dan Kecamatan Sabak Auh. Kabupaten Siak beriklim tropis dengan curah hujan antara 1.971,4 mm/bulan, temperature udara antara 25-37<sup>o</sup> C. Kabupaten Siak memiliki batas-batas wilayah dengan wilayah lain, yaitu:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru

#### 1. Kecamatan Kandis

Kecamatan kandis adalah kecamatan dari Kabupaten Siak dengan jumlah desa yang terdiri dari Desa Bekalar Belutu, Jambai Makmur, Kandis, Kandis

Kota, Pencing Bekulo, Sam Sam, Simpang Belutu, Sungai Gondang, Telaga Sam Sam, dan Desa Bekalar.

Kacamatan Kandis secara umum kecamatan yang sedang berkembang dari segi desa serta dari segi jumlah penduduk serta. Berikut dapat dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan desa sebagai berikut :

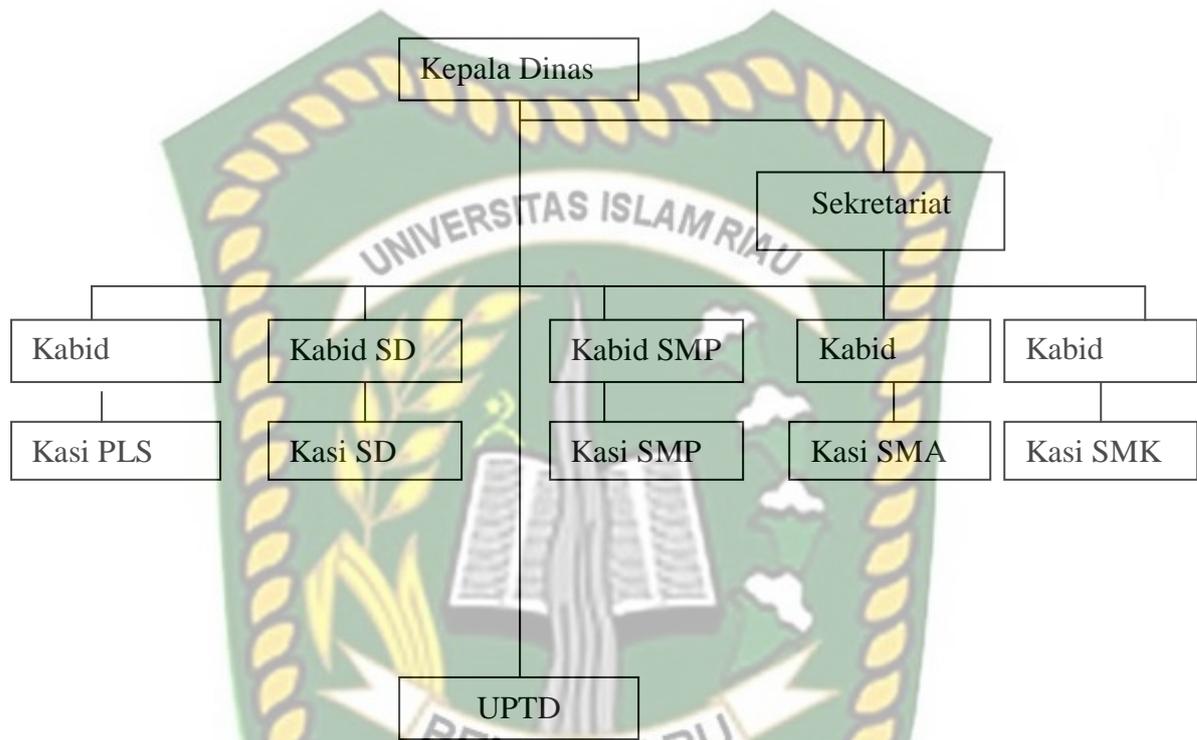
**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan populasi 2018**

<b>Nama Desa/Kelurahan</b>	<b>Populasi</b>
Bekalar Belutu	4.979
Jambai Makmur	5.434
Kandis	4.290
Kandis Kota,	5.549
Pencing Bekulo	10.590
Sam Sam	2.316
Simpang Belutu	11.972
Sungai Gondang	5.997
Telaga Sam Sam	585
Desa Bekalar	6.050
<b>Jumlah Populasi</b>	<b>57.762</b>

*Sumber : Kecamatan Kandis, 2019*

## 2. Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak

**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak**



Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak dalam menjalankan tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas dan didukung oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 6(enam) orang KepalaBidang, 18 (delapan belas) orang Kepala Seksi, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan 14 (empat belas) orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan; dan
  - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak sebagaimana terlampir, yakni terdiri dari :<sup>71</sup>

- a. Kepala Dinas
- b. Sekrateriat terdiri dari :
  1. Sub penyusunan program
  2. Sub bagian Keuangan
  3. Sub bagian Umum dan kepegawaian
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (TK) dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
  1. Seksi Taman Kanak-kanak (TK)
  2. Seksi Kelompok Belajar (KB)
  3. Seksi Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat (PSM)
- d. Bidang Sekolah Dasar (SD)
  1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD
  2. Seksi Ketenagaan

<sup>71</sup> peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak

3. Seksi Sarana dan Prasarana SD
- e. Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP
  2. Seksi Sarana dan Prasarana SMP
  3. Seksi ketenagaan SMP
- f. Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA)
  1. Seksi Kurikulum SMA
  2. Seksi Sarana dan Prasarana SMA
  3. Seksi Tenaga Teknis, Kependidikan dan Kesiswaan SMA
- g. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
  1. Seksi Kurikulum SMK
  2. Seksi Sarana dan Prasarana SMK
  3. Seksi Tenaga teknis, Kependidikan dan Kesiswaan SMK
- h. Bidang Kebudayaan
  1. Seksi Pembina Seni dan Budaya
  2. Seksi Sejarah
  3. seksi Pembinaan Adat Istiadat
- i. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)  
Kelompok jabatan fungsional

Berdasarkan uraian diatas melalui Bidang Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud Bidang Sekolah Dasar (SD) melaksanakan sebagian tugas dinas dalam mengembangkan, memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan mengkoordinasikan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan, penyusunan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasaran pendidikan serta peningkatan/pemberdayaan tenaga teknis pendidik dan kependidikan pada jenjang SD. Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Merumuskan rencana dan program bidang SD;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja tahunan guna untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Koordinasi dan supervise pengembangan kurikulum SD;

- d. Mengkoordinasikan pemahaman terhadap kurikulum melalui sosialisasi dan fasilitas implementasi kurikulum SD maupun motivasi murid;
- e. Menyelenggarakan peningkatan mutu sarana/prasarana melalui pengawasan dan pendayagunaan bantuan serta pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana SD;
- f. Mengkoordinasikan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan penambahan kebutuhan tenaga pendidik, tenaga kependidikan maupun pengusulannya;
- h. Mengkoordinasikan aneka tunjangan (profesi, kualifikasi, fungsional dan khusus) pada jenjang SD;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kinerja guru, penilaian kinerja berkelanjutan guru pada jenjang SD;
- j. Mengkoordinasikan penilaian dan penyusunan angka kredit guru dan DUPAK pada jenjang SD;
- k. Mengendalikan dan mengkoordinasikan serta menyusun laporan kinerja seksi dilingkungan bidang;
- l. Mengkoordinasikan untuk peningkatan mutu lulusan SD serta mengupayakan murid untuk masuk ke SMP maupun penyusunan laporan; dan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Tabel 4.2 Pendiak Di Kabupaten Siak 2018**

	1	2	3	4	5	6
1.	Minas	17	14	8	1	2
2.	Kandis	28	26	19	7	5
3.	Siak	11	13	10	3	2
4.	Sungai Apit	20	23	10	5	1
5.	Sungai Mandau	3	8	6	1	0
6.	Kerinci Kanan	13	13	8	2	2
7.	Lubuk Dalam	12	8	5	3	1
8.	Tualang	44	35	23	5	6
9.	Koto Gasib	18	17	7	2	1
10.	Dayun	22	20	10	6	1
11.	Bunga Raya	14	17	8	2	1
12.	Mempura	11	12	5	3	1

	1	2	3	4	5	6
13.	Sabak Auh	6	10	4	1	0
14.	Pusako	7	7	4	1	0
<b>Jumlah</b>		<b>229</b>	<b>223</b>	<b>127</b>	<b>42</b>	<b>23</b>

*Sumber : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak, 2019*

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

#### **A. Identitas Responden**

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner dan wawancara.

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuissioner, wawancara dan kuisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden. Dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel 4.3. Klasifikasi Responden Penelitian Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Berdasarkan Jenis Kelamin.**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Laki-Laki	25	74%
2	Perempuan	9	6%
Jumlah		34	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian Laki-laki yang terdiri SD sebanyak 9 orang perempuan dan 25 laki-laki, yang terdiri dari pegawai dinas Pendidikan dan Pegawai SD. Sehingga jumlah keseluruhan berjumlah 34 orang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selanjutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel 4.4. Klasifikasi Responden Penelitian Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Berdasarkan Umur**

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	≤ 25 tahun	-	-
2	26-39 tahun	10	29%
3	40-49 tahun	20	59%
4	≥ 50 tahun	4	12%
Jumlah		34	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 40-49 tahun dengan jumlah 20 orang yang terdiri dari pegawai Dinas Pendidikan dan pegawai SD. usia 40-49 tahun merupakan usia yang produktif dan aktif dalam melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan pegawai Dinas Pendidikan dan Guru SD. Kemudian usia responden umur 25-39 sebanyak 10 yang terdiri dari pegawai Dinas Pendidikan dan pegawai SD, berusia 50 keatas berjumlah 4 terdiri dari pegawai Dinas Pendidikan dan pegawai SD dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang

merupakan factor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel 4.5. Klasifikasi Responden Penelitian Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	SMA	5	14%
2	Diploma	10	29%
3	Sarjana	18	52%
4	Pasca Sarjana	1	3%
Jumlah		34	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019*

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah sarjana sebanyak 18 orang terdiri dari pegawai Dinas Pendidikan dan pegawai SD. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan Diploma yang mana berjumlah 10 terdiri dari pegawai Dinas Pendidikan dan pegawai SD responden. selanjutnya responden SMA sebanyak 5 responden terdiri dari pegawai Dinas Pendidikan dan pegawai SD, sarjana sebanyak 1 responden terdiri dari pegawai Dinas Pendidikan dan pegawai SD.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis**

Dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis dengan memberikan pembinaan terhadap pelaksana pendidikan SD Kecamatan Kandis. Hal ini menjelaskan terhadap Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis. Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak

Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis melalui pelaksanaan tugas Kepala Bidang Sekolah Dasar telah memberikan kontribusi yang dinilai Bidang Sekolah Dasar telah melaksanakan tugasnya berdasarkan ketetapan kinerja dalam pembinaan yang didasarkan tugas yang diembannya. Bidang Sekolah Dasar melihat apa yang menjadi penghambat dalam memberikan didikan sekolah terhadap murid-murid yang akan menerima materi pendidikan. Hal ini dilakukan Bidang Sekolah Dasar dengan prosedur penetapan waktu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dimana turun langsung kelapangan melihat mengawasi dan mengamati jalannya pendidikan yang terselenggara dengan melihat saranan prasaranan pendukung pendidikan, potensi guru pengajar, kurikulum yang digunakan serta laporan tahunan dari SD dan masyarakat yang berdiam dalam menerima pendidikan di SD tersebut.

Namun yang menjadi permasalahan dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kandis dalm hal tugas Bidang Sekolah Dasar dalam memberikan pembinaan terhadap Guru Pengajar pendidikan SD di Kecamatan Kandis belum seera merata diberikan. pendidikan masih ada SD yang belum diperhatikan secara luas oleh Dinas Pendidikan sehingga belum memenuhi standar pengajar mulai dari penetapan kurikulum, guru mengajar dan fasilitas sarana prasarana pendukung pembelajaran sehingga dimana diketahui masih banyak SD yang belum melaksanakan pendidikan dengan baik sesuai dengan kurikulum SD yang ditetapkan Oleh Kementrian Pendidikan. Hal ini

mengakibatkan keluhan oleh masyarakat karena belum adanya Dinas Pendidikan dalam mengawasi melihat dalam kemajuna pendidikan yang ada secara terarah dalam Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu yang menghasilkan siswa yang berkualitas nantinya.

Melihat keadaan tersebut perlu adanya kebijakan yang lebih terarah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar dengan terarah yang berdasarkan waktu ketentuan yang ditetapkan serta pemberian arahan terhadap pegawai Dinas Pendidikan dalam mengarahkan bentuk-bentuk meningkatkan mutu pendidikan yang bersekala pendidikan agar didalam meningkatkan mutu pendidikan terhadap guru pengajar pegawai paham dan tau jelas apa yang akan diberikan terhadap guru dalam kemajuan SD tersebut, dan pegawai dapat mengawasi keberlangsungan kegiatan mengajar di Sekolah Dasar tersebut melalui kurikulum yang digunakan, sarana prasarana, dan kegiatan mengajar. Dari data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dan kusioner dengan responden pegawai pelaksana pembinaan, guru pengajar serta masyarakat yang sedang mengikuti pendidikan SD, maka penulis akan mengajikan dan menyajikan dan menganalisis data-data tersebut dalam bentuk uraian serta gambaran mengenai Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis.

### C. Analisis Data

Untuk mengetahui Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis dalam penyelenggaraan pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Siak meliputi Mengembangkan Memantau, Mengendalikan dan Menilai, Hal ini dianalisa sebagai berikut :

#### 1. Mengembangkan

Mengembangkan dalam penelitian ini adalah Pengembangan pendidikan yang berdasarkan kurikulum SD, sumber daya pelaksana dan sarana prasaranan. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Mengembangkan yang terlaksana yaitu :

1. Penetapan Kurikulum.
2. Tata pembelajaran.
3. Pemberian Pelatihan Guru.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kandis dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel 4.6. Jawaban Responden Mengenai Indikator Pengembangan Dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis.**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penetapan Kurikulum	10 (30%)	18 (55%)	5 (15%)	33
2	Sumber Daya Manusia	9 (27%)	21 (63%)	3 (9%)	33
3	Sarana prasarana	11 (33%)	20 (61%)	2 (6%)	33
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>59</b>	<b>10</b>	<b>99</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>10</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
<b>Persentase</b>		<b>30%</b>	<b>61%</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Pengembangan dalam item penilaian Kurikulum SD responden penelitian pada Bidang Sekolah Dasar dalam Pembinaan Pendidikan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Siak yang menjawab terlaksana sebanyak 10 responden atau (30%) dengan alasan, Dalam melaksanakan pembinaan oleh oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten siak Bidang Sekolah Dasar dalam kemajuan pendidikan SD yang ada diKecamatan Kandis dengan melihat apa yang menjadi prioritas penetapan standar pendidikan yang diterapkan dalam pendidikan SD dimana dalam pembinaan yang diberikan oleh Bidang Sekolah Dasar melalui kurikulum pendidikan SD yang telah ditetapkan dari Menteri Pendidikan sehingga alur pelaksanaan pendidikan berlangsung dengan terlaksana . Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 18 responden atau 55% dengan alasan, Pembinaan yang diberikan Bidang Sekolah Dasar terhadap pelaksana pendidikan SD dikecamatan Kandis terhadap Guru pengajar dengan

menetapkan kurikulum yang telah ditetapkan, akan tetapi dalam pelaksanaan pembinaan yang diberikan tugas Bidang Sekolah Dasar belum merata diberikan pembinaan melalui penerapan pendidikan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan melainkan hanya pemberian arahan kinerja guru dalam memberikan pendidikan terhadap siswa SD. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 15% dengan alasan, Bidang Pendidikan Luar Solah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak belum melaksanakan tugasnya secara merata hal ini dimana Bidang Sekolah Dasar hanya memberikan pembinaan melalui arahan pengajaran saja melainkan bukan bentuk pendidikan yang diberikan terhadap murid SD berdasarkan melalui pengajaran Kurikulum yang telah ditetapkan.

Kemudian untuk item penilaian Sumber Daya Manusia yang mana responden penelitian pada Bidang Sekolah Dasar dalam Pembinaan Pendidikan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Siak yang menyatakan terlaksana berjumlah 9 responden atau 27% dengan alasan, dalam pelaksanaan tugas Bidang Sekolah Dasar dimana Bidang Sekolah Dasar melihat apa yang menjadi Meningkatkan mutu pendidikan yang dilaksanakan dalam pengajar SD melalui Sumber Daya pengajar, hal ini dimana pengajar harus memiliki potensi pengajar didalam bidangnya masing-masing sehingga pendidikan yang diberikan terhadap murid SD terlaksana serta menghasilkan murid yang cerdas dan berkualitas, Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 21 responden atau 63% dengan alasan, Sumber Daya pengajar yang dilaksanakan guru dalam memberikan pengajaran terhadap murid SD dengan

melihat potensi sumber daya pengajarnya, akan tetapi Bidang Sekolah Dasar belum mengarahkan sumber daya dalam pengajarannya secara merata di SD Kecamatan Kandis sehingga dalam pengajaran yang diberikan terhadap murid SD cenderung tidak sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 15% dengan alasan dalam arah pendidikan melalui Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam sumber daya pendidikan murid SD belum menetapkan potensi guru dalam pengajarannya sehingga guru pengajar melalui kemampuannya masing-masing.

Kemudian untuk item penilaian Sarana Prasarana yang mana responden penelitian pada Bidang Sekolah Dasar dalam Pembinaan Pendidikan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Siak yang menyatakan terlaksana berjumlah 11 responden atau 33% dengan alasan, sarana prasarana dalam pendidikan dimana Bidang Sekolah Dasar melihat apa yang menjadi bagian penunjang pendidikan dengan memberikan himbauan dalam kelengkapan sarana-prasaranan terhadap SD yang ada serta membenahi apa yang harus dilengkapi seperti ruangan kelas, kursi, papantulis, serta gedung SD. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 61 % dengan alasan, dalam sarana prasaranan sebagai pendukung mutu pendidikan SD Bidang Sekolah Dasar melihat langsung ke SD yang ada, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas Bidang Sekolah Dasar masih belum secara merata melaksanakan peminaan dalam bentuk sarana prasana kelengkapan melainkan hanya dalam bentuk himbauan sekedar saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab

kurang terlaksana sebanyak 2 responden atau 6 % dengan alasan dalam pelaksanaan tugas Bidang Sekolah Dasar dimana dalam pembinaan terhadap mutu pendidikan melalui sarana dan prasarana belum melaksanakan tugasnya dengan terlaksana melainkan dalam arah saja terhadap pendidikan SD.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pengembangan Dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis dalam katagori cukup terlaksana, kata gori cukup terlaksana dengan nilai responden 20 atau 60 % dengan alasan, dalam pembinaan pendidikan SD oleh Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah terlaksana dalam melaksanakan pengembangan pendidikan SD akan tetapi dalam pelaksanaan pendidikan tersebut belum dilaksanakan dengan prosedur maupun ketetapan waktu yang telah ditetapkan melainkan hanya dalam bentuk arahan dan himbuan sehingga dalam pengajaran yang berlangsung hanya inisiatif guru mengajar. Hal ini didapat dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Pengembangan dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis melalui Kurikulum SD, Sumber Daya Manusia., Sarana prasarana dalam pengembangan pendidikan SD di Kecamatan Kandis.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Kadri yafis sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam pembinaan pendidikan SD di Kecamatan Kandis tanggal 14 Januari 2019 menjelaskan bahwa :<sup>72</sup>

“Saya sudah memberikan kewenangan dalam melaksanakan tugas pegawai berdasarkan jabatannya dalam pembinaan pengembangan Bidang Sekolah Dasar yang didasarkan, Kurikulum SD, Sumber Daya Manusia pelaksana, Sarana prasarana dengan tujuan pengembangan mutu pendidikan yang lebih berpotensi”

Berikut hasil wawancara dengan Ibuk Nining Rizkianti sebagai Kepala Bidang Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam pembinaan pendidikan SD di Kecamatan Kandis tanggal 14 Januari 2019 menjelaskan bahwa :<sup>73</sup>

“...Sejauh ini kami sudah melaksanakan pengembangan pendidikan SD yang didasarkan tugas yang kami emban dengan menetapkan kemajuan SD melalui penetapan Kurikulum SD, sumber daya pengajar yang sesuai dengan bidangnya masing-masing serta melihat sarana prasarana yang ada dalam mendukung kemajuan pendidikan. Hal ini kami sudah melaksanakan pengembangan pendidikan berdasarkan ketetapan tugas yang diberikan kepada kami sehingga pendidikan SD di Kecamatan Siak memiliki mutu dan keberhasilan pengajaran dengan baik meskipun dalam pengembangan yang kami berikan belum secara merata dapat terlaksana karena pegawai dalam memberikan arahan pengembangan SD belum adanya ketetapan waktu dalam memberikan pengembangan langsung kelapangan...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis dalam melaksanakan pengembangan pendidikan SD dengan menetapkan kemajuan SD melalui

<sup>72</sup> wawancara dengan Bapak Kadri yafis dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam pembinaan pendidikan SD di Kecamatan Kandis tanggal 14 Januari 2019

<sup>73</sup> wawancara dengan Ibuk Nining Rizkianti Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam pembinaan pendidikan SD di Kecamatan Kandis tanggal 14 Januari 2019

penetapan Kurikulum SD, sumber daya pengajar yang sesuai dengan bidangnya masing-masing serta melihat sarana prasarana yang ada dalam mendukung kemajuan pendidikan, meskipun terkadang dalam pengembangan yang dilaksanakan Bidang Sekolah Dasar belum secara merata dapat terlaksana karena sedikitnya waktu pegawai dalam memberikan arahan pengembangan SD serta kurangnya jumlah pegawai di lapangan. sehingga dapat dikatakan Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis dalam katagori Cukup Terlaksana.

## **2. Memantau**

Memantau dalam penelitian ini adalah dimana Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak memantau penyelenggaraan Kegiatan pembelajaran SD melalui proses belajar, kegiatan guru mengajar dan ketepatan guru dalam mengajar. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Memantau yang terlaksana yaitu :

1. Proses belajar
2. Kegiatan mengajar.
3. Kesidiplinan guru pengajar.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu

Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel 4.7. Jawaban Responden Mengenai Indikator Mamantau Dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis.**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Proses belajar	8 (24%)	22 (67%)	3 (6%)	33
2	Kegiatan mengajar	9 (27%)	19 (58%)	5 (15%)	33
3	Kesidiplinan guru pengajar	10 (30%)	20 (60%)	3 (6%)	33
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>61</b>	<b>13</b>	<b>99</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>9</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>33</b>
<b>Persentase</b>		<b>27%</b>	<b>31%</b>	<b>12%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Pengembangan dalam item penilaian Proses belajar responden penelitian pada Bidang Sekolah Dasar dalam Pembinaan Pendidikan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Siak yang menjawab terlaksana sebanyak 8 responden atau (24%) dengan alasan, Bidnag Pendidikan Luara sekolah dalam melaksanakan tugasnya sudah turun langsung kelapangan dalam melihat kegiatan proses belajar dengan tujuan agar mengetahui bagaimana bentuk pengajaran diberikan terhadap murid SD secara langsung. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 22 responden atau 67% dengan alasan, dalam kegiatan belajar di SD kecamatan Kandis Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Siak Bidang Sekolah Dasar Sejauh ini sudah melihat dalam kegiatan pembelajaran terhadap murid SD, akan tetapi Dinas Pendidikan dalam memantau kegiatan

proses belajar tidak melihat secara keseluruhan sampai dengan selesai melainkan hanya melihat kegiatan belajar hanya sekedarnya saja tidak sampai mulai masuk kelas jam 00.08 wib sampai dengan jam 00.11 wib. Sehingga bentuk pemantauan yang dilaksanakan Bidang Sekolah Dasar hanya sekedarnya saja dalam melaksanakan tugasnya dan tidak mengetahui apakah bentuk pengajaran yang diberikan guru terhadap muridnya sudah layak apa belum secara materi keseluruhannya. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 3 responden atau 6% dengan alasan, pemantauan yang dilaksanakan Bidang Sekolah Dasar Belum terlaksana dengan terlaksana hal ini diketahui dalam pelaksanaannya Bidang Sekolah Dasar hanya melihat bagai mana proses belajar yang terselenggara melainkan bukan dari jam masuk belajar hingga sampai selesainya kegiatan belajar.

Kemudian untuk item penilaian Kegiatan mengajar yang mana responden penelitian pada Bidang Sekolah Dasar dalam Pembinaan Pendidikan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Siak yang terlaksana sebanyak 9 responden atau (27%) dengan alasan, dalam kegiatan mengajar yang terlaksana di SD Kecamatan Kandis dimana Bidang Sekolah Dasar melihat langsung kelapangan dalam melihat kegiatan mengajar yang dilaksanakan guru pengajar dengan tujuan agar mengetahui bagaimana bentuk guru dan potensi dalam memberikan pengajaran terhadap murid SD secara langsung. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 19 responden atau 58% dengan alasan, dalam kegiatan mengajar yang berlangsung di SD kecamatan Kandis dimana Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten

Siak Se jauh ini sudah melihat dalam kegiatan pengajaran yang diberikan guru kelas terhadap murid SD, akan tetapi pemantauan Bidang Sekolah Dasar dalam kegiatan pengajaran belum mencerminkan tugas Bidang Pendidikan Luar Sekolah dimana hal ini diketahui pemantau yang dilaksanakan tidak adanya himbauan atau arahan terhadap guru pengajar melainkan hanya sekedar melihat saja dan tidak berdasarkan kegiatan pengajaran sampai dengan selesai. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 15% dengan alasan, pemantauan yang dilaksanakan Bidang Sekolah Dasar Belum terlaksana dengan terlaksana hal ini diketahui dalam pelaksanaannya Bidang Sekolah Dasar hanya melihat bagaimana proses pengajaran yang diberikan guru pengajar tanpa adanya himbauan atau pengarahan serta pemantau yang dilaksanakan tidak berdasarkan jam mulai proses pembelajaran sampai dengan selesai melainkan hanya memantau sebentar saja kegiatan pengajaran yang diberikan oleh guru terhadap murid SD di Kecamatan Kandis.

Kemudian untuk item penilaian Kesidiplinan guru pengajar yang mana responden penelitian pada Bidang Sekolah Dasar dalam Pembinaan Pendidikan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Siak yang terlaksana sebanyak 10 responden atau (30%) dengan alasan, pelaksanaan kegiatan mengajar yang terlaksana di SD Kecamatan Kandis dimana Bidang Pendidikan melihat langsung kelengkapan dalam disiplin kegiatan mengajar yang dilaksanakan guru pengajar dengan tujuan agar mengetahui jam berapa waktu ketentuan jam masuk kegiatan pengajaran sampai dengan selesai terhadap murid SD. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 60%

dengan alasan, berlangsungnya kegiatan mengajar di SD Kecamatan Kandis dimana Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Siak sudah melihat pelaksanaan pengajaran yang berlangsung di SD Kecamatan Kandis, akan tetapi pemantauan Bidang Sekolah Dasar dalam kesidiplinan pengajaran yang oleh guru pengajar SD belum melaksanakan pemantau terhadap disiplin guru pengajar secara ketentuan mulai belajar murid sampai dengan selesai melainkan pemantauan yang dilaksanakan sudah berlangsungnya jam masuk pembelajaran sehingga Bidang Sekolah Dasar tidak mengetahui secara luas jam masuk SD sampai dengan Selainya. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 3 responden atau 6% dengan alasan, pemantauan yang dilaksanakan Bidang Pendidikan Luar secara umum Belum terlaksana dengan terlaksana, diketahui dalam pelaksanaannya Bidang Sekolah Dasar hanya melihat disiplin pengajar SD hanya pada saat proses pembelajaran saja melainkan tidak mulai jadwal pembelajaran yang akan dilaksanakan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pemantauan Dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis dalam katagori cukup terlaksana, kata gori cukup terlaksana dengan nilai responden 20 atau 60 % dengan alasan, dalam melaksanakan tugas Bidang Sekolah Dasar dalam pembinaan pendidikan SD sudah terlaksana dalam melaksanakan pemantauan kegiatan proses pembelajaran SD tetapi dalam pemantauan pelaksanaan proses belajar SD belum dilaksanakan dengan jadwal atau rincian pemantauan yang akan dilaksanakan melainkan

pemantauan yang terlaksanan hanya dalam melihat proses belajar pengajaran SD saja tidak berdasarkan jam masuk belajar sampai dengan selesai. Hal ini didapat dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Pemantauan dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis melalui Proses belajar, Kegiatan mengajar, Kesidiplinan guru pengajar dalam pemantauan pendidikan SD di Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Kadri yafis sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam pembinaan pendidikan SD di Kecamatan Kandis tanggal 14 Januari 2019 menjelaskan bahwa :<sup>74</sup>

“Sejauh ini tugas Bidang Sekolah Dasar saya sudah mengarahkannya melalui tugas Bidang Sekolah Dasar terutama dalam pemantauan kegiatan pembelajaran yang diberikan guru pengajar melalui kegiatan Proses belajar, Kegiatan mengajar, Kesidiplinan guru pengajar”

Berikut hasil wawancara dengan Ibuk Nining Rizkianti sebagai Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam pembinaan pendidikan SD di Kecamatan Kandis tanggal 14 Januari 2019 menjelaskan bahwa :<sup>75</sup>

“...Dalam pemantauan pengembangan pendidikan SD kami sudah turun langsung ke SD dalam melihat keberlangsungan kegiatan pembelajaran. hal ini kami laksana berdasarkan tugas yang akan kami laksanakan dalam pengembangan pendidikan SD dengan melihat bagaimana bentuk proses belajar yang terlaksana, kegiatan mengajar yang diberikan guru pengajar serta bentuk kedisiplinan guru dalam ketepatan waktu mulai masuk jam mengajar sampai dengan selesai, meskipun dalam pemantauan yang kami

---

<sup>74</sup> wawancara dengan Bapak Kadri yafis dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam pembinaan pendidikan SD di Kecamatan Kandis tanggal 14 Januari 2019

<sup>75</sup> wawancara dengan Ibuk Nining Rizkianti Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam pembinaan pendidikan SD di Kecamatan Kandis tanggal 14 Januari 2019

langsungkan tidak secara merata terlaksana mulai jam masuk pembelajaran sampai dengan selesai melainkan terkadang kami datang jam pelajaran sudah berlangsung dikarenakan keterbatasan pegawai dalam memantau serta jauhnya SD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak sehingga pelaksanaan pemantauan tidak berjalan dengan baik, akan tetapi kami langsung mengarahkan dan memberikan masukan dalam kegiatan pengajaran, proses pembelajaran serta ketepatan waktu dalam pengajaran SD ...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis dalam melaksanakan pemantauan pendidikan SD dengan dalam kemajuan SD melalui proses belajar yang terlaksana, kegiatan mengajar yang diberikan guru pengajar serta bentuk kedisiplinan guru dalam ketepatan waktu mulai masuk jam mengajar sampai dengan selesai, meskipun dalam pemantauan yang berlangsung tidak secara merata terlaksana mulai jam masuk pembelajaran sampai dengan selesai melainkan terkadang pemantauan oleh Bidang Sekolah Dasar kegiatan pembelajaran sudah berlangsung hal ini dikarenakan keterbatasan pegawai dalam memantau serta jauhnya SD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak sehingga pelaksanaan pemantauan tidak berjalan dengan baik, akan tetapi Bidang Sekolah Dasar langsung mengarahkan dan memberikan masukan dalam kegiatan pengajaran, proses pembelajaran serta ketepatan waktu dalam pengajaran SD. Sehingga dapat dikatakan Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis dalam kategori Cukup Terlaksana.

### 3. Mengendalikan

Mengendalikan dalam penelitian ini adalah dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam mengendalain kemajuan pendidikan luar sekolah yang berdasarkan perkembangan SD, Guru mengajar, dan materi yang diajarkan. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Mengendalikan yang terlaksana yaitu :

1. Perkembangan SD.
2. Perkembangan Guru mengajar.
3. Materi yang diajarkan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel 4.8. Jawaban Responden Mengenai Indikator Mengendalikan Dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis.**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Perkembangan SD	6 (18%)	23 (70%)	4 (12%)	33
2	Perkembangan Guru mengajar	9 (27%)	20 (60%)	4 (12%)	33
3	Materi yang diajarkan diajarkan	11 (33%)	19 (58%)	3 (6%)	33
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>62</b>	<b>11</b>	<b>99</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>9</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
<b>Persentase</b>		<b>27%</b>	<b>64%</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Mengendalikan dalam item penilaian Perkembangan SD responden penelitian pada Bidang Sekolah Dasar dalam Pembinaan Pendidikan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Siak yang menjawab terlaksana sebanyak 6 responden atau (18%) dengan alasan, Dalam melaksanakan pembinaan oleh oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten siak Bidang Sekolah Dasar dalam perkembangan SD yang ada diKecamatan Kandis dengan melihat apa yang menjadi prioritas kemajuan pendidikan dengan penetapan standar pendidikan yang diterapkan dalam pendidikan SD dimana dalam menegndalikan Perkembangan SD oleh Bidang Sekolah Dasar melalui potensi pengajar, sarana prasarana pendukung serta kurikulum pendidkan SD yang telah ditetapkan dari Mentri Pendidkan sehingga pendidikan berlangsung akan bermutu dan berkualitas. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 70% dengan alasan, dalam mengendalikan

perkembangan SD melalui Bidang Sekolah Dasar terhadap pelaksana pendidikan SD dikecamatan Kandis melihat potensi Guru pengajar sarana prasarana pendukung, serta menetapkan kurikulum yang telah ditetapkan, akan tetapi dalam pelaksanaan pengendalian dalam perkembangan SD yang dilaksanakan Bidang Sekolah Dasar belum terlaksana dengan baik melalui penerapan pendidikan yang lebih bermutu yang ditetapkan melainkan perkembangan SD hanya pemberian arahan kinerja terhadap guru dalam memberikan pendidikan terhadap siswa/siswi SD dan bentuk sarana prasara pendukung kegiatan pembelajaran. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 4 responden atau 12% dengan alasan, Bidang Pendidikan Luar Solah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak belum melaksanakan tugasnya secara baik dan merata hal ini dimana Bidang Sekolah Dasar hanya memberikan arahan dalam perkembangan SD saja melainkan bukan bentuk penetapan potensi pendidikan yang diberikan terhadap murid SD berdasarkan pendidikan guru pengajar agar terciptanya perkembangan SD secara baik.

Kemudian untuk item penilaian Perkembangan guru mengajar yang mana responden penelitian pada Bidang Sekolah Dasar dalam Pembinaan Pendidikan SD Dinas Pendidkan dan Kebudayaan kabupaten Siak yang terlaksana sebanyak 9 responden atau (27%) dengan alasan, perkembangan guru mengajar di SD Kecamatan Kandis dimana Bidang Pendidikan melihat kegiatan SD langsung ke sekolah dalam disiplin kegiatan mengajar yang dilaksanakan guru pengajar dengan tujuan agar mengetahui jperkembangan guru pengajar. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 60%

dengan alasan, berlangsungnya kegiatan mengajar di SD Kecamatan Kandis dimana Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Siak sudah melihat pelaksanaan guru pengajaran yang berlangsung di SD Kecamatan Kandis, akan tetapi pemantauan Bidang Sekolah Dasar dalam kegiatan guru mengajar kesidiplinan SD belum merata melihat kegiatan disiplin guru pengajar secara ketentuan mulai belajar murid sampai dengan selesai serta mengendalikan guru yang mengajar agar lebih efektif dalam memberikan materi sesuai dengan pengajaran SD. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 4 responden atau 12 % dengan alasan, pengendalian yang dilaksanakan Bidang Pendidikan Luar secara umum Belum terlaksana dengan baik, diketahui dalam pelaksanaannya Bidang Sekolah Dasar hanya melihat bentuk pengajar yang diberikan pada murid yang sesuai dengan pengetahuan anak usia dini melainkan serta tidak adanya arahan dalam memberikan pengajaran yang lebih baik terhadap guru pengajar.

Kemudian untuk item penilaian Materi yang diajarkan yang mana responden penelitian pada Bidang Sekolah Dasar dalam Pembinaan Pendidikan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Siak yang menjawab terlaksana sebanyak 11 responden atau (33%) dengan alasan, dalam melaksanakan pengendalian oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Siak Bidang Sekolah Dasar materi yang diajarkan oleh guru diKecamatan Kandis dengan melihat melalui standar pendidikan yang diterapkan dalam pendidikan SD yang diberikan oleh Bidang Sekolah Dasar melalaui kurikulum pendidikan SD yang telah ditetapkan dari Mentri Pendidikan sehingga alur pelaksanaan pendidikan

berlangsung dengan baik. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 19 responden atau 58% dengan alasan, pengendalian Bidang Sekolah Dasar terhadap materi yang diajarkan pendidikan SD dikecamatan Kandis terhadap Guru pengajar dengan menetapkan kurikulum yang telah ditetapkan, akan tetapi dalam pelaksanaan pengendalian yang diberikan Bidang Sekolah Dasar belum merata diberikan melalui penererapan pendidikan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan melainkan hanya pemberian arahan kinerja guru dalam memberikan pendidikan terhadap siswa/siswi SD. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 6 % dengan alasan, Bidang Pendidikan Luar Solah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak sejauh ini belum melaksanakan tugasnya secara baik, hal ini dimana Bidang Sekolah Dasar hanya memberikan arahan melauai arahan pengajaran saja melainkan bukan bentuk materi pengajaran yang diberikan terhadap murid SD berdasarkan melalui pengajaran Kurikulum yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai pengendalian Dalam Tugas Kepala Bidang Sekolah Dasar Dalam Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Studi SD Kecamatan Kandis) dalam katagori cukup terlaksana, kata gori cukup terlaksana dengan nilai responden 21 atau 64 % dengan alasan, dalam melaksanakan tugas Bidang Sekolah Dasar dalam pengendalian materi yang diajarkan sudah baik dalam melaksanakan pengendalian kegiatan proses pembelajaran SD tetapi dalam

pengendalian pelaksanaan proses belajar melalui materi yang diajarkan SD belum dilaksanakan melalui peruses materi yang diajarkan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan melainkan hanya dalam melihat proses belajar pengajaran SD saja tidak berdasarkan tujuan yang akan dilaksanakan. Hal ini didapat dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Pengendalian dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis melalui Perkembangan SD, Perkembangan Guru mengajar, Materi yang diajarkan diajarkan dalam pengendalian pendidikan SD di Kecamatan Siak.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bapak Kadri yafis sebagai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam pembinaan pendidikan SD di Kecamatan Kandis tanggal 14 Januari 2019 menjelaskan bahwa :<sup>76</sup>

“Dalam perkembangan Pendidikan SD saya menetapkan Bidang Sekolah Dasar sebagai pelaksana dilapangan yang bertujuan dalam mengendalikan perkembangan pembelajaran SD di Kecamatan Kandis dengan melihat bagaimana perkembangan SD, Guru mengajar serta Materi yang diajarkan secara merata di SD Kecamatan Kandis”

Berikut hasil wawancara dengan Ibuk Nining Rizkianti sebagai Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam pembinaan pendidikan SD di Kecamatan Kandis tanggal 14 Januari 2019 menjelaskan bahwa :<sup>77</sup>

“...Dalam pengendalian pendidikan SD kami langsung ke SD dalam melihat keberlangsungan proses pembelajaran. hal ini berdasarkan tugas yang akan kami laksanakan dalam pengendalian kegiatan belajar

<sup>76</sup> wawancara dengan Bapak Kadri yafis dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam pembinaan pendidikan SD di Kecamatan Kandis tanggal 14 Januari 2019

<sup>77</sup> wawancara dengan Ibuk Nining Rizkianti Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam pembinaan pendidikan SD di Kecamatan Kandis tanggal 14 Januari 2019

pendidikan SD dengan melihat bagaimana bentuk perkembangan SD yang di kecamatan Kandis, perkembangan guru mengajar yang diberikan guru pengajar serta bentuk materi pengajaran yang diajarkan, meskipun dalam pengendalian yang kami langsung tidak secara merata terlaksana mulai selesai melainkan terkadang kami hanya pengarahan pembelajaran saja dikarenakan keterbatasan jumlah pegawai dalam mengendalikan kegiatan pembelajaran sehingga pelaksanaan pengendalian tidak berjalan dengan baik, akan tetapi kami selalu mengarahkan dan memberikan masukan dalam kegiatan proses pembelajaran...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis pengendalian kegiatan belajar pendidikan SD dengan melihat bagaimana bentuk perkembangan SD yang di kecamatan Kandis, perkembangan guru mengajar yang diberikan guru pengajar serta bentuk materi pengajaran yang diajarkan, meskipun dalam pengendalian yang kami langsung tidak secara merata terlaksana mulai selesai melainkan terkadang hanya bentuk pengarahan pembelajaran saja dikarenakan keterbatasan jumlah pegawai dalam mengendalikan kegiatan pembelajaran sehingga pelaksanaan pengendalian tidak berjalan dengan baik, akan tetapi Bidang Sekolah Dasar selalu mengarahkan dan memberikan masukan dalam kegiatan proses pembelajaran. Sehingga dapat dikatakan Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis dalam kategori Cukup Terlaksana.

#### **4. Menilai**

Menilai dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam menilai kepastian pendidikan dalam bentuk penilaian sekolah, kinerja guru, serta mutu pendidikan. Untuk itu penulis mencoba

menganalisa bagaimana Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Menilai yang terlaksana yaitu :

- a. Menilai sekolah
- b. Kinerja guru.
- c. Mutu pendidikan

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel 4.9. Jawaban Responden Mengenai Indikator Menilai Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis.**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Menilai sekolah	12 (36%)	13 (39%)	8 (24%)	33
2	Kinerja guru.	9 (27%)	17 (51%)	7 (12%)	33
3	Mutu pendidikan	10 (33%)	19 (58%)	4 (6%)	33
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>49</b>	<b>19</b>	<b>99</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>11</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>33</b>
<b>Persentase</b>		<b>33%</b>	<b>48%</b>	<b>18%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Menilai dalam item penilaian Menilai sekolah responden penelitian pada Bidang Sekolah Dasar dalam Pembinaan Pendidikan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten

Siak yang menjawab terlaksana sebanyak 12 responden atau (30%) dengan alasan, dalam penilaian sekolah melalui sarana prasarana dalam pendidikan Bidang Sekolah Dasar melihat apa yang menjadi bagian penunjang pendidikan dengan kelengkapan sarana-prasarana terhadap kemajuan SD yang ada serta membenahi apa yang harus dilengkapi seperti ruangan kelas, kursi, papantulis, serta gedung SD. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 13 responden atau 39 % dengan alasan, dalam penilaian kemajuan SD sarana prasarana adalah sebagai pendukung mutu pendidikan SD dimana Bidang Sekolah Dasar melihat langsung ke SD yang ada, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas Bidang Sekolah Dasar masih belum secara merata melaksanakan penilaian terhadap kemajuan SD melalui sarana prasana pendukung kegiatan pembelajaran melainkan hanya dalam bentuk pemberitahuan kelengkapan kegiatan mengajar. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 24 % dengan alasan dalam pelaksanaan tugas Bidang Sekolah Dasar dimana dalam penilaian terhadap mutu pendidikan melalui sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran belum melaksanakan tugasnya dengan baik melainkan hanya penilaian saja tidak adanya sanksi maupun arahan yang lebih jelas yang diberikan.

Kemudian untuk item penilaian kinerja guru yang mana responden penelitian pada Bidang Sekolah Dasar dalam Pembinaan Pendidikan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Siak yang baik sebanyak 9 responden atau (27%) dengan alasan, perkembangan kinerja guru mengajar di SD Kecamatan Kandis dimana Bidang Pendidikan melihat kegiatan SD langsung ke sekolah

dalam disiplin kegiatan mengajar yang dilaksanakan guru pengajar dengan tujuan agar mengetahui kinerja guru. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 71 responden atau 51% dengan alasan, berlangsungnya kegiatan mengajar di SD Kecamatan Kandis dimana Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Siak sudah melihat pelaksanaan guru pengajaran yang berlangsung di SD Kecamatan Kandis, akan tetapi pemantauan Bidang Sekolah Dasar dalam kegiatan guru mengajar kesidiplinan SD belum merata melihat kegiatan disiplin guru pengajar secara ketentuan mulai belajar murid sampai dengan selesai serta mengendalikan guru yang mengajar agar lebih efektif dalam memberikan materi sesuai dengan pengajaran SD. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 7 responden atau 12 % dengan alasan, pengendalian yang dilaksanakan Bidang Pendidikan Luar secara umum Belum terlaksana dengan baik, diketahui dalam pelaksanaannya Bidang Sekolah Dasar hanya melihat bentuk pengajar yang diberikan pada murid yang sesuai dengan pengetahuan anak usia dini melainkan serta tidak adanya arahan dalam memberikan pengajaran yang lebih baik terhadap guru pengajar.

Kemudian untuk item penilaian Mutu pendidikan yang mana responden penelitian pada Bidang Sekolah Dasar dalam Pembinaan Pendidikan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Siak yang menyatakan baik sebanyak 10 responden atau (33%) dengan alasan, perkembangan pendidikan SD dikecamatan kandis dengan penilaian oleh Bidang Sekolah Dasar dalam hal mutu pendidikan yang terlaksana dengan tujuan terciptanya pendidikan SD diKecamatan Kandis yang bermanfaat terhadap murid-murid SD untuk melanjuSDan kejenjang

selanjutnya. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 19 responden atau 58% dengan alasan, berlangsungnya kegiatan mengajar di SD Kecamatan Kandis dengan pendidikan Luar Sekolah memantau dan mengawasi bentuk pengajaran yang diberikan yang berdasarkan kurikulum yang berlaku, hal ini dilakukan agar terciptanya pendidikan yang lebih baik akan tetapi Bidang Sekolah Dasar belum secara merata dapat menerapkan bagaimana pendidikan yang diberikan sekolah terhadap murid dikarenakan banyaknya jumlah SD yang ada serta kurangnya pegawai dalam memantau dan mengawasi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 7 responden atau 12 % dengan alasan, penilaian terhadap mutu pendidikan yang berdasarkan kegiatan pengajar murid SD di Kecamatan kandis oleh Bidang Sekolah Dasar dinilai belum secara merata diberikan pengawasan dan pemantauan sehingga masih ada SD yang belum memiliki kegiatan pengajaran yang didasarkan kurikulum yang berlaku sehingga kegiatan mengajar hanya berdasarkan kemampuan guru pengajar saja.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Menilai Dalam Tugas Kepala Bidang Sekolah Dasar Dalam Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Studi SD Kecamatan Kandis) dalam kategori cukup terlaksana, kata gori cukup baik dengan nilai responden 16 atau 48 % dengan alasan, dalam melaksanakan tugas Bidang Sekolah Dasar dalam menilai mutu pendidikan yang diberikan guru pengajar terhadap murid-murid yang berdasarkan kurikulum pengajaran SD melalui pemantaun pengawasan SD serta kegiatan

pengajaran. Akan tetapi dalam halnya penilaian yang dilaksanakan Bidang Sekolah Dasar dinilai belum secara keseluruhan diberikan penilaian dikarenakan kurangnya jumlah pegawai serta keterbatasan waktu, sehingga pendidikan SD di Kecamatan Kandis cenderung menggunakan pengajaran guru masing-masing tidak berdasarkan kurikulum yang berlaku.. Hal ini didapat dari hasil tanggapan responden yang menanyakan menilai dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis melalui Menilai sekolah, Kinerja guru, Mutu pendidikan dalam berlangsungnya kegiatan pengajaran pendidikan SD di Kecamatan Siak.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Kadri yafis sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam pembinaan pendidikan SD di Kecamatan Kandis tanggal 14 Januari 2019 menjelaskan bahwa :<sup>78</sup>

“Dalam perkembangan SD saya memberikan pengarahan terhadap tugas Bidang Sekolah Dasar dalam menilai kelayakan sekolah bagaimana perkembangan kinerja guru yang mengajar dan mengarahkan mutu pendidikan yang terlaksana di SD tersebut”

Berikut hasil wawancara dengan Ibuk Nining Rizkianti sebagai Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam pembinaan pendidikan SD di Kecamatan Kandis tanggal 14 Januari 2019 menjelaskan bahwa :<sup>79</sup>

“...Sejauh ini penilaian yang kami laksanakan adalah bertujuan untuk mengarahkan pendidikan SD kearah yang lebih baik hal ini kami lakukan

<sup>78</sup> wawancara dengan Bapak Kadri yafis dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam pembinaan pendidikan SD di Kecamatan Kandis tanggal 14 Januari 2019

<sup>79</sup> wawancara dengan Ibuk Nining Rizkianti Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dalam pembinaan pendidikan SD di Kecamatan Kandis tanggal 14 Januari 2019

dengan memantau kegiatan pembelajaran SD, Guru pengajar serta bagaimana bentuk penetapan kegiatan mengajar yang berdasarkan kurikulum pendidikan SD, Meskipun secara keseluruhan kami belum optimal dalam menilai pendidikan SD dikecamatan Kandis dikarenakan kurangnya jumlah personil kami serta keterbatasan waktu sehingga penilaian yang diberikan belum optimal. Tetapi kami sudah mengarahkan SD yang ada dalam memberikan pendidikan yang berdasarkan kurikulum yang berlaku.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis pengendalian kegiatan belajar pendidikan SD dengan penilaian yang kami laksanakan adalah bertujuan untuk mengarahkan pendidikan SD kearah yang lebih baik hal ini Bidang Sekolah Dasar dengan melakukan pemantauan pengawasan kegiatan pembelajaran SD Guru pengajar serta bagaimana bentuk penetapan kegiatan mengajar yang berdasarkan kurikulum yang berlaku, Meskipun secara keseluruhan kami belum optimal dalam menilai pendidikan SD dikecamatan Kandis dikarenakan kurangnya jumlah personil kami serta keterbatasan waktu sehingga penilaian yang diberikan belum optimal. Tetapi kami sudah mengarahkan SD yang ada dalam memberikan pendidikan yang berdasarkan kurikulum yang yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis dalam katagori Cukup Terlaksana.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.10. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis.**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Mengembangkan	10 (30%)	20 (61%)	3 (9%)	33
2	Memantau	9 (27%)	20 (31%)	4 (12%)	33
3	Mengendalikan	9 (27%)	21 (64%)	3 (9%)	33
4	Menilai	11 (33%)	16 (48%)	6 (18%)	33
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	<b>77</b>	<b>16</b>	<b>99</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>10</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>33</b>
<b>Persentase</b>		<b>30%</b>	<b>58%</b>	<b>12%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019*

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden pelaksanaan tugas Bidang Sekolah Dasar untuk Mengembangkan yang menjawab terlaksana 10 atau 30%, Selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana 20 atau 61%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 3 atau 9%.

Untuk indikator kedua yaitu Memantau dalam pelaksanaan tugas Bidang Sekolah Dasar yang menjawab terlaksana 9 responden atau 27%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 31%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 4 responden atau 12%.

Untuk indikator ketiga Mengendalikan dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Bidang Sekolah Dasar yang menjawab terlaksana 9 responden atau 27%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 21 responden atau 64%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 3 responden atau 9%.

Untuk indikator keempat Menilai dalam pelaksanaan tugas Bidang Sekolah Dasar yang menjawab terlaksana 11 responden atau 33%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 16 responden atau 48%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 18%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab terlaksana dengan rata-rata 19 orang atau persentase 58%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana dengan rata-rata 16 orang atau persentase 48%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana 4 orang atau 12%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Tugas Kepala Bidang Sekolah Dasar Dalam Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Studi SD Kecamatan Kandis) sudah Cukup Terlaksana dengan melakukan pengembangan pendidikan SD melalui kurikulum yang ditetapkan sarana prasarana pendukung sekolah, memantau kegiatan pembelajaran sekolah mulai dari guru pengajar potensi guru serta kegiatan belajar, mengendalikan kegiatan pembelajaran agar pendidikan yang diberikan terhadap murid-murid terarah dan dapat dipahami, serta penilaian dengan menilai sekolah bagaimana kelayakannya, kinerja guru dalam mengajar serta kualitas mutu pendidikan yang bertujuan agar murid-murid nantinya memiliki tingkat kemampuan belajarnya lebih terlaksana . Sehingga keseluruhan dalam pelaksanaan tugas Bidang Sekolah Dasar dinyatakan Cukup Terlaksana hal ini didapat dari keseluruhan jawaban responden yang menjawab dengan rata-rata 19 atau persentase 58%, dengan melihat pengukuran yang telah penulis tentukan sebelumnya yaitu dalam rentang antara 34%-65% maka Peranan Dinas

Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis dalam katagori Cukup Terlaksana.

#### **D. Hambatan Dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis**

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis, meliputi :

Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis melalui Bidang pendidikan SD diketahui jumlah pegawai dalam pengembangan pendidkan SD di Kecamatan Kandis belum maksimal didalam melaksanakan tugasnya hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai dalam melakukan Mengembangkan, Memantau, Mengendalikan, Menilai kegiatan pendidikan Sekolah Dasar secara menyeluruh yang ada di Kecamatan Kandis sehingga masih ditemuinya Sekolah Dasar belum menetapkan kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang ditetapkan agar tercapainya peningkatan mutu Pendidikan Sekolah Dasar secara merata di Kecamatan Kandis.

Pemantauan Dinas Pedidikan terkait peningkatan mutu pendidikan dimana masih belum terlaksana dengan baik dimana pegawai dinilai masi lambat dalam mendata dan memberikan penanganan akan hambatan-hambatan yang terjadi dalam meningkatkan mutu pendidikan SD seperti pemberian himbauan penetapan kurikulum dan penetapan potensi guru pengajar yang sesuai dengan tingkat

pendidikannya serta ketentuan waktu pembelajaran mulai dari jam masuk sampai dengan jam pulang.

Pengendalian Dinas Pendidikan terhadap mutu pendidikan di Sekolah dasar Kecamatan Kandis belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan pegawai belum memiliki terobosan terkait apa saja upaya yang akan dilakukan terhadap sekolah didalam meningkatkan mutu pendidikan melainkan pegawai hanya mengarahkan bentuk kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan.

Kompetensi Bidang Sekolah Dasar belum melaksanakan tugasnya secara optimal terhadap penilaian kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Sekolah Dasar di Kecamatan Kandis mulai dari waktu kegiatan pembelajaran, guru pengajar dan hasil kegiatan pembelajaran dalam satu semester belum dapat dilakukan secara merata sehingga kegiatan pembelajaran terlihat belum mengarah pencapaian tujuan didalam meningkatkan mutu Pendidikan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis cukup terlaksana dimana diketahui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak sudah melakukan akan peningkatan pendidikan sekolah dengan melakukan pengembangan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, melakukan pengawasan kegiatan pembelajaran Sekolah, memberikan pembinaan pelatihan terhadap Guru, dan melakukan pengawasan akan sarana prasarana pendukung kegiatan pembelajaran Sekolah Dasar akan tetapi belum terlaksana dengan maksimal sehingga kegiatan peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar belum belangsung dengan baik.
2. Hambatan dalam Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis belum memberikan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Kecamatan Kandis. Hal ini di akibatkan kurangnya jumlah petugas didalam melakukan pengembangan mutu pendidikan serta serta pemantauan kegiatan pembelajaran dengan tujuan mengetahui apa saja yang harus dibenahi dalam kemajuan pendidikan SD. Kemampuan teknis petugas Bidang Sekolah Dasar yang dinilai masi lambat dalam penilaian akan hambatan-hambatan yang

terjadi dalam meningkatkan mutu pendidikan SD di kecamatan Kandis terhadap kemajuan pendidikan SD tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hambatan Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Kandis adapun saran yang ditetapkan sebagai berikut ;

1. Hendaknya Dinas Pendidikan melalui Bidang Sekolah Dasar Dalam melakukan pengembangan kegiatan pembelajara sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Perlunya Dinas Pendidikan melalui Bidang Sekolah Dasar melakukan pemantau kegiatan pembelajaran, guru pengajar, dan hasil pembelajaran dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak perlunya melakukan pengendalian terkait penetapan kegiatan pembelajaran mulai dari guru pengajar serta kegiatan pembelajaran.
4. Perlunya penilaian oleh Dinas pendidikan dikarenakan masih ditemui Pendidikan SD yang belum melaksanakan pengajaran pembelajaran yang berdasarkan kurikulum yang berlaku.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Arimbi, Achmad Santosa, 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Awang Azam, 2010, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Cahayani, Ati. 2003, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta PT Gramedia Widiasama
- David Osborne, Peter Plastrik, 2004. *Lima Strategi Menuju Pemerintah Wirausaha*, Terjemahan Abdul Rosyid dan Ramelan, Jakarta.
- Dessler, Gary. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Index.
- Efendi, Mahrizal, 2003. *Pembinaan Ekonomi dan budaya indonesia*. Jakarta ; Balai Pustaka.
- Fatah, nanang. 2003. *Landasan Manajemen, Rosdakarya*, Bandung.
- Gibson, Ivancevich Donelly, 2007. *Organisasi*, Bina Rupa Aksara. Jakarta
- Hatifah Sj. Sumarto, 2003. *inovasi, partisipasi dan Good Governace*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hasibuan, H.Melayu,S.P. 2006. *Manajemen dasar, Pengertian & Masalah Edisi Ketujuh*. Jakarta, Bumi Aksara
- Hidayat. 2000. *Organisasi Publik*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Hamin, Sufiyan. 2005. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen (Studi Ilmu, Teori Konsep dan Aplikasi)*. Bandung : Multi Grapindo.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. *Manajemen Publik*. 2005. Jakarta: Grasindo.
- Ibnu Syamsi 2004 , *Pokok-pokok Organisasi & Manajemen*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ismail, Maimunah, 2001, *Pengembangan Implikasi Keatas Pembangunan Masyarakat*. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Indonesia, Kuala Lumpur.
- Inu Kencana Syafiie, 1999 , *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta : Rineka Cipta.

- Ivancevich, John, M, dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, jilid 1 dan 2 Jakarta : Erlangga.
- Jones, 1991, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Bandung, Mandar Maju.
- John Suprihanto, dkk, *Seni Kepemimpinan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN*, Yogyakarta.
- Karl, Fremont E. 2002. *Organisasi dan Manajemen (edisi 4)*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Karto Hadi Kusumo, 1984, *Desa*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Kansil, 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Imu L.P. Sinambela, 1992. *Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*, Rineka Cipta.
- Kartini Kartono 2004, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Kusdi, 2009, *Teori Organisasi dan Administrasi*, Penerbit Salemba Humanika; Jakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu., 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung : Refika Aditama.
- Mathis R.L dan Jackson J.H, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Madjloes, 1981, *Beberapa Petunjuk bagi Kepala Desa*, Jakarta.
- Mifftah Thoha. 2008. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi..* Jakarta: Kencana.
- Moenir, H.A.S., 2001, *Pelayanan Umum di Indonesia*, Cetakan Kelima, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Mohd. As'ad, *Psikologi Industri*, Yogyakarta Liberty.
- Muchtar Buchori, 1994. *Pendidikan Dalam Pembangunan*. PT Tiara Wacana Jogja, Yogyakarta.
- Mukono, 2002. *Pengembangan Usaha*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

- Mulyasa, E..2006. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Ndraha Taliziduhu, 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_. 2008, *Kibernologi dan Kepamongprajaan*, Banten, Sirao Credantia Center
- Pamuji, 1992, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara
- Rasyid, Muhammad Ryaas, 1998. *Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone.
- \_\_\_\_\_, 2007, *memaknai Fungsi Pemerintahan, Cetakan VI*, Jakarta, Penerbit PT. Mutiara Sumber Widya.
- Suderadjat, Hari. 2005. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Bandung : Cipta Cekasa Grafika.
- Syafaruddin. 2002. *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Konsep, Strategi dan Aplikasi*. Jakarta : Grasindo.
- Syafei Inu Kencana, 2003, *Ilmu Pemerintahan (Edisi Refisi)*, Bandung, Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung PT. Refika Aditama.
- Tisnawati Sule, *Emie dan Kurniawan Saefuulaah*, Pengantar Manajemen, Jakarta, Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sondang, P Siagian. 2009. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Bumi aksara.
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Suryaningrat, 1992, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sedarmayanti, 2001, *Dasar-Dasar Pengetahuan tentang manajemen perkantoran*, Bandung, Mandar maju.

\_\_\_\_\_, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bandung. Mandar Maju.

Wahab S.A, 2004, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*, Jakarta, Bumi Aksara.

Waluyo, 2007, *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Penerbit Mandar Maju; Jakarta.

Winardi, 2010, *Asas-asas Manajemen*; Bandung.

Winarsih. 2006. *Manajemen Pelayanan*.. Pustaka Pelajar, Jakarta.

Wibowo, 2007, *Manajemen Kinerja, Jakarta*, Penerbit PT. Raja Grafindo.

William A. Cohen, 1992, *Seni Kepemimpinan*, Jakarta, Mitra Utama.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru : UIR PRESS.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak

## **C. Dokumen**

Depdiknas. 2007. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005 – 2009*. Jakarta : Pusat Informasi dan Humas Depdiknas.